

**KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN THAILAND TERHADAP
KOMUNITAS MUSLIM(STUDI KASUS RESPON PENGURUN MASJID
AL-HIDAYAH AL-ISLAMIAH DALAM PENDIRIAN SEKOLAH
MELAYU/TADIKA DI WILAYAH PATANI THAILAND SELATAN)**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos) dalam ilmu Ushuluddin dan studi agama**

OLEH

**HAMDI SALAEHING
NPM. 1331040103**

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

KEBJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN THAILAND TERHADAP KOMUNITAS MUSLIM

**(Studi Kasus Respon Pengurus Masjid Al-Hidayah Al-Islamiah Dalam
Pendirian Sekolah Melayu/Tadika Di Wilayah Patani Thailand Selatan)**

Oleh:

Hamdi Salaebing

Semenjak kedatangan pemerintahan Thailand pada tahun 1901 di wilayah patani penjajahan dilakukan oleh pemerintahan Thailand yaitu dengan membentuk pemerintah baru. Semenjak pemerintahan baru Thailand pendidikan Islam tradisional yang dikenal dengan sekolah Melayu senan tiasa mendapat tekanan dan gangguan. Penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah Melayu yang menggunakan kurikulum Agama Islam dan bahasa Melayu selalu diawasi oleh pemerintahan Thailand. Kondisi ini menyebabkan kehati hati dalam mengembangkan pendidikan Agama Islam dan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari hari

Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan politik pemerintahan Thailand terhadap komunitas muslim dan juga untuk mengetahui respon pengurus masjid Al-hidayah Al-islamiah terhadap pendirian sekolah Melayu/Tadika dengan rumusan masalah, apa saja kebijakan politik pemerintahan Thailand terhadap komunitas Muslim(kebijakan terkait pendidikan) dan bagaimana respon pengurus masjid *Al-hidayah Al-islamiah* terhadap pendirian sekolah Melayu/Tadika. Penelitian ini menggunakan metode menggunakan kuantitatif dan skriptif penelitian lapangan dengan respon pengurus masjid *Al-hidaya Al-ilamiah* dalam pendirian sekolah Melayu/Tadika di desa Bendangdalam. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini adalah kebijakan politik pemerintahan Thailand terhadap komunitas muslim (studi kasus respon pengurus Masjid *Al-hidayah Al-islamiah* dalam pendirian sekolah Melayu/Tadika di Wilayah Patani Thailan Selatan) dengan menggunakan kebijakan pengurus Masjid untuk merespon dari kebijakan pemerintahan Thailand melalui mengeluarkan ide-ide kegiatan buka puasa bersama di bulan Romadhon, kegiatan hari kesepuluh hari Asyura, kegiatan perayaan Pentasni di hari Raya Idul Adha, Syarikat mati, respon terhadap sistem integrasi di sekolah Melayu/Tadika, uang honorarium, kegiatan jamu makan kepada guru sekolah Melayu/Tadika perbaikan terhadap kurikulum di sekolah Melayu/Tadika dan kegiatan-kegiatan lain yang tercakup dengannya. Dengan menggunakan kebijakan pengurus masjid bisa menyadari masyarakat dan menyatukan masyarakat untuk mempertahankan jati diri orang melayu dan dalam bisa pendirian sekolah melayu/tadika kepada kanak-kanak sebagai menanamkan tumbuhnya yang beril dan beragama di hari besok akan nanti



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : JL. Letko. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Tlp. (072)703278

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN THAILAND
TERHADAP KOMUNITAS MUSLIM(studi kasus respon
pengurun masjid Al-hidayah Al-islamiah dalam pendirian
sekolah Melayu/TADIKA di Wilayah Patani Thailand
Selatan).**

Nama : Hamdi Salaebing

NPM : 1331040103

Jurusan : Pemikira Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETULUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan
Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Effendi M. Hum
NIP.195807211986031004

Tin Amalia Fitri. M.Si
NIP.19780130211012004

**Ketua Jurusan
Pemikiran Politik Islam**

Drs. Nadirsah Hawari, M.A
NIP. 197406282008011013




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**


Alamat : JL. Letko. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung. Tlp. (072)703278


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN THAILAND TERHADAP KOMUNITAS MUSLIM(studi kasus respon pengurus masjid Al-hidayah Al-islamiah dalam pendirian sekolah Melayu/TADIKHA di Wilayah Patani Thailand Selatan)”**, di susun oleh : **HAMDI SALAEHING, NPM : 1331040103, Jurusan Pemikiran Politik Islam**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal: Jumat, 23 Febuari 2018.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua Sidang : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.A (.....)


Sekretaris : Tin Amalia Fitri, M.Si (.....)

Pengji I : Dr. H. Ali Abdul Wahid, M.Si (.....)

Penguji II : Drs. Effendi M. Hum (.....)

Dekan

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,


Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.A
Nip: 195808231993031001

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S : Al-Anbiya : 21)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan pada orang-orang yang selalu mendukung terselesaikannya karya ini, di antaranya:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ahmad dan Ibunda Solihah yang selalu memberikan motivasi yang sangat besar untuk mencapai keberhasilanku dan dengan sabar melimpahi aku dengan do'a dan kasih sayang.
2. Saudara kandungku tersayang, Sabedee, Zainab, Aisyah, Asman, yang selalu menantikan keberhasilanku.
3. Bapa dan ibu dosen yang telah mendidik dan memberi bimbingan dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
4. Kepada teman-temanku di jurusan pemikiran politik islam 2013, yang selalu memberikan keceriaan dan semangat untuk meraih kesuksesan.
5. Sahabat-sahabarku tercinta dari Pesatuan Mahasiswa Melayu Patani di Indonesia(PMMPI) yang selalu memberikan semangat dan terimakasih atas jasa baik kalian.
6. Yang kubanggakan almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Hamdi Salaebing bin Ahmad, di lahirkan di Patani Thailand Selatan, pada tanggal 11 September 1990, anak keempat dari delapan bersaudara, dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Solihah.

Jenjang pendidikan penulis yaitu:

1. Sekolah dasar dari pendidiakan Nasonal di *chumchon baan Sanorschool*, Daerah Yarang Wilayah Patani selama 7 tahun dan tamat pada tahun 2000-2001
2. TADIKA*Al-hidayah Al-islamiah* Bendangdalam mukim Sanor Daerah Yarang wilayah Patani, selama 6 tahun dan tamat pada 2001-2002
3. Sekolah Agama, Mu-assasah Darul Aman Banggol Ta'kelan, Daerah Yarang Wilayah Patani selama 8 tahun dan tamat padatahun 2011-2012
4. Kemudian melanjut studi ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin jurusan pemikiran politik Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “*KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN THAILAND TERHADAP KOMUNITAS MUSLIM(studi kasus respon pengurus masjid Al-hidayah Al-islamiah dalam pendirian sekolah Melayu/TADIKA di wilayah Patani Thailand Selatan)* ” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam disampaikan kepada nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S-1), pada Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Saijana Ushuluddin dalam jurusan Pemikiran Politik Islam. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M. Ag., selaku Dekan Fakultu Ushuluddin serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakults Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr. Nadirsah Hawari, MA selaku ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Ibu Tin Amalia Fitri,M.S. selaku sekretaris jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung;

4. Drs. Effendi M. Hum, selaku pembimbing I, dan Tin Amalia Fitri,M.Si. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini;
5. Para dosen serta para staf karyawan Fakultas Usbuluddin UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu peneliti selama mengikuti Perkuliahan;
6. Bapak, Ibu, dan Adik serta teman-teman dekat, yang senantiasa mendo'a kan, membantu, serta memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Ushuluddin Angkatan 2013.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu, tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Demikian yang penulis dapat sampaikan diharapkan betapa pon kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 31 Januari 2018
Peneliti,

Handi Salaebing
NPM:1331040103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul.....	1
B. Alasan memilih judul	3
C. Latar belakang masalah.....	4
D. Rumusan masalah.....	7
E. Tinjauan penelitian.....	7
F. Manfaat penelitian.....	8
G. Metode penelitian.....	8
H. Tinjauan pustaka.....	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemerintah Cina Terhadap Minoritas Muslim Ughur.....	14
B. Kebijakan Pemerintah Afrika Selatan Terhadap Minoritas	18
C. Kebijakan pemerintah jerman terhadap minoritas (masyarakat menangani Arus pendatang), muslim di jerman menetap 16,4 juta orang warga dengan riwayat pasca migrasi sumber: Martin Stoever/Bongarts/Gitty Images	22
D. Kebijakan pemerintah indonesia terhadap komunitas.....	26

BAB III MENGENAL PATANI DAN KEBIJAKAN DAN PEMERINTAHAN THAILAND

A. Gambaran umum patani	29
1. Islam masuk di patani.....	29
2. Pendirian Majlis Agama Islam.....	36
3. Peraturan Negara Thailand.....	43
4. Gambara Umum Masjid Al-hidayah Al-ialamiah.....	45
5. Petugas Kepengurusan Masjid Al-hidayah Al-islamiah	48
6. Gambaran Umum Sekolah Melayu/Tadika.....	50

7. Kebijakan Politik Pemerintahan Thailand Terhadap Komunitas Muslim Patani	70
---	----

BAB IV RESPON PENGURUS MASJID TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN THAILAND

A. Analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam pendidikan.....	63
B. Respon Pengurus Masjid Al-Hidayah Al-Islamiah Terhadap Pendirian Sekolah Melayu/Tadika	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang penting dalam satu karya ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi ini. Adapun judul karya ilmiah yang menulis bahasan dalam skripsi ini adalah : **“KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH THAILAND TERHADAP KOMUNITAS MUSLIM**

(Studi Kasus Respon Pengurus Masjid Al-Hidayah Al-Islamiah dalam Pendirian Sekolah Melayu/TADIKA Di Wilayah Patani Thailand Selatan)”

Menghindari salah pengertian dalam memahami maksud dalam skripsi ini, terlebih dahulu akan peneliti uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang dikehendaki penulis.

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan politik Pemerintah Thailand dalam penelitian ini adalah kebijakan politik pemerintah terkait dengan pendidikan untuk melihat tujuannya, dampaknya terhadap komunitas Muslim Melayu Thailand kepada masyarakat Melayu Patani Thailand Selatan dengan mengetahui terhadap kebijakan tersebut. Sentimen penjajah Nasionalisme menjadi sentimen siam yang terus mengukuhkan. Para pemimpin siam mulai menyusun dasar negara yang berasaskan satu Agama, satu Bangsa, satu bahasa, dan satu kebudayaan yaitu

siam. menggunakan strategi yang sudah di persiapkan untuk melakukan program Asimilasi keatas penduduk minoritas di seluruh Thailand, termasuk masyarakat Melayu Patani Darussalam. Salah satu program asimilasi tersebut dilaksanakan melalui program pendidikan dasar.¹

Komunitas muslim, komunitas adalah kelompok organisasi(Orang dan sebagainya) yang hidup saling berinteraksi di dalam daerah tertentu.² Maksud komunitas muslim dalam skripsi ini adalah kehidupan orang-orang muslim sebagai komunitas di Patani terhap mayoritas Budha Thailand

Sekolah Melayu/TADIKa adalah sekolah setingkat dasar(SD) yaitu berusia semenjak 6-12 tahun, Sekolah Melayu/TADIKa menggunakan dua kurikulum yaitu kurikulum Agama dan kurikulum umum, kurikulum Agama adalah fungsi sekolah sebagai pusat pendidikan Agama dengan menggunakan bahasa Melayu tulisan jawi, dan sekolah Melayu/TADIKa dengan menggunakan kurikulum nasional adalah pembaruan kurikulum dengan menggunakan bahasa jawi bergabung dengan huruf Aksara Thailand.

Pengurus Masjid yakni menyelenggarakan usaha kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan.³ Jadi pengurus Masjid adalah beberapa orang yang berada dalam struktur pengurusan masjid. Masjid *Al-hidayah Al-islamiah* adalah sebuah tempat kegiatan ibadah, berada di Desa *Bendangdalam* mukim *Sanor* Daerah *Yarang* Wilayah Patani (Thailand selatan).

¹ Heery Nurdi PERJUANGAN MUSLIM PATANI sejarah perjuangan penindasan dalam cita-cita perdamaian di patani darussalam (ALAM RAYA ENTERPRISER SDN BHD, 2010), hlm 77

² KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA PUSAT BAHASA, Edisi Keempat Dpartemen Pendidikan nasional(PT Gramedia pustaka utama Jakarta, 2008.Hlm 722

³Sidi Gazalba, masjid pusat ibdah dan kebudayaan islam, (Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1994) cet.KelIV,hlm35

Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya, seperti sekolah dasar, lanjutan, sekolah tinggi; tidak terpelajar.⁴ Yang di maksud dalam penelitian ini adalah sekolah Melayu/TADIKHA, yang merupakan setingkat sekolah dasar yaitu siswanya berusia 6-12 tahun. Kurikulum sekolah Melayu/TADIKHA berbeda dengan sekolah umum. Sekolah Melayu/TADIKHA sebagai pusat pengajian Al-Quran dan Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu bukan bahasa siam(Thai).⁵

Respon adalah tanggapan, reaksi, jawaban.⁶ Maksud respon dalam skripsi ini yaitu jawaban pengurus masjid terhadap kebijakan pemerintah, maksudnya mengadakan kebijakan bagi pengurus masjid untuk tanggapan terhadap kebijakan pemerintah.

Dari penegasan istilah-istilah di atas maka dapat didefinisikan adalah penelitian tentang kebijakan politik Pemerintah Thailand terkait dengan pendidikan sekolah dasar untuk tujuannya, dampaknya, terhadap komunitas muslim dengan mengetahui tanggapan pengurus masjid *Al-hidayah Al-islamiah* terhadap kebijakan tersebut

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan mengapa penulis tertarik dan memilih judul ini:

1. Alasan subyektif

⁴Pengertiansekolahtersedia di: <http://kbbi.web.id/sekolah>,diaksespada 05 Desember 2016, 20:43

⁵<https://pusakamnir.wordpress.com/จำนวนตาดิกา/>03 Desember 2017/22:55

⁶KAMUS BESAR INDONESIA, edisi keempat, departemen pendidikan nasional PT Gramedia Pustaka Utama (Jakarta 2008). Hlm1170

- a. Untuk melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
- b. Judul yang diangkat ada relevansinya yaitu mengenai hak pilih yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Dan ada hubungannya jurusan penulis yaitu Pemikiran Politik Islam, dan lokasi mudah untuk mencari data
- c. Judul yang diangkat akan menjadi satu karya, sebagai panduan catatan sejarah

2. Alasan objektif

- a. Judul yang diangkat akan menjadi satu karya, sebagai panduan catatan sejarah pendirian sekolah
- b. Data yang hasil dari wawancara dalam skripsi akan menghindari masalah dalam pendirian sekolah

C. Latar Belakang Masalah

Awal dimulanya penyebaran pendidikan Islam tradisional di Asia Tenggara tidak dapat diketahui dengan pasti, demikian juga di Patani (Thailand Selatan), tetapi terdapat beberapa catatan sejarah yang menurut Ahmad Umar “bahwa pendidikan pondok tradisional mulai ada di Patani sejak kedatangan Agama Islam di bumi Patani kemudian dikembangkan oleh rakyat Patani selama 300 tahun sebelum Raja Patani Sultan Ismail Syah memeluk Agama Islam (1488-1511)”⁷. Setelah baginda memeluk Agama Islam anggota keluarga dan pembesar istana turut memeluk Islam, sejak itu mulailah Islam berkembang di Patani secara

⁷ Ahmad Umar Chapakia, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902-2002*, (Malaysia, UKM, 2000), cet. Ke-1. hlm. 25

terang-terangan dan mengumumkan sebuah kedaulatan kerajaan Islam Melayu Patani Darussalam.

Semenjak kedatangan pemerintahan Thailand di Patani tersebut yang berimplikasi dengan penjajah oleh Pemerintah Thailand terhadap masyarakat Patani dengan dibentuk pemerintahan baru, yang dimana pemerintahan tersebut dikuasai Pemerintahan Thailand. Semenjak saat itu pendidikan Islam tradisional yang dikenal dengan sekolah Melayu sering mendapat tekanan dan gangguan dari pemerintah Thailand.

Masyarakat Patani selalu dicurigai dan diawasi oleh pihak pemerintahan Thailand ketika belajar ilmu Agama Islam dan bahasa Melayu. Pemerintahan Thailand menjadikan sekolah Melayu sebagai objek pengawasan dan intaian agar mengtaui informasi perkembangan pendidikan masyarakat Patani. Melihat kondisi tersebut, banyak masyarakat Patani yang lebih memilih hati-hati dalam menggunakan bahasa Melayu dalam masyarakat umum.

Begitupun dalam hal penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekolah Melayu/ TADIKA, Masyarakat Patani mengatur siasat agar tidak diketahui oleh pemerintah Thailand, yakni dengan diselenggarakan KBM sekolah Melayu/TADIKA secara sembunyi-sembunyi.

Pihak Pemerintah Thailand sangat cemburu dengan sekolah Agama dan juga kalimat Melayu, maka keluarlah ide oleh *Al-marhum* Saifuddin, sekolah Melayu yang sering disebut pada saat ini dengan nama taman didikan kanak-kanak atau TADIKA adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyeleggarakan pendidikan formal jenis Agama dan kebangsaan, sekolah Melayu/TADIKA adalah pusat belajar Al-quran dan Bahasa Melayu dirumah-rumah para ustaz yang

mengajarkan Al-quran kemudian di lanjutkan dengan belajar ilmu tajwid dan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa jawi.

Sekolah Melayu/TADIKAs bertujuan untuk memberi pengajaran dasar pembelajaran tentang ilmu Agama islam serta budaya dan keterampilan lainnya sejak usia dini, dasar-dasar Agama islam dan Bahasa Melayu pada anak usia kanak-kanak, sekolah dasar atau madrasah *ibtidaiyah* SD atau bahkan yang lebih infokan lagi untuk memberikan pendidikan dalam membangunkan karakter anak Bangsa Melayu Muslim Patani pada umumnya.

Pertumbuhan taman didikan kanak-kanak TADIKAs menemukan pada tahun 1950 an hingga kehari ini. Sekolah Melayu/ TADIKAs, masyarakat Melayu Patani telah didirikan sejak tanggal 27 Oktober 1949. TADIKAs yang merupakan sekolah setingkat dengan SD atau sekolah yang diperuntukan kepada anak yang usia antara 6 sampai 12 tahun didirikan oleh Masyarakat Patani di pertengahan abad ke-20

Semenjak 4 April 2016 di C S Hotel Patani Pusat Pendidikan Islam di Masjid (TADIKAs) adalah institusi belajar. Memahami praktik moral, etis, dan doktrin komunitas Muslim di provinsi perbatasan selatan. Menggunakan bangunan masjid adalah tempat mengajar dan mengajar pendidikan Islam. Tingkat dasar wajib Sudah waktunya mengajar Sabtu sampai hari Minggu. .Dengan tersedianya masyarakat Program "Tata Good Credit" dirancang untuk memastikan kualitas sistem pendidikan yang dilengkapi dengan baik di berbagai bidang seperti

fasilitas, administrasi, akademik, budaya moral, etika, pelajar. Dan hubungan masyarakat.⁸

Karena sekolah Melayu didirikan atas dasar mengaplikasikan dari tujuan tersebut, maka banyak Masyarakat Melayu yang menjadi alumnus dari sekolah tersebut memiliki pengetahuan yang dalam Ilmu Agama Islam dan Bahasa Melayu serta ilmu pengetahuan yang bersifat modernitas.

Atas dasar kecintaan dan keperihatinan terhadap masyarakat Melayu Patani. Maka banyak pengurus masjid di daerah masyarakat Patani yang tergerak hatinya untuk mengerbankan fikiran waktu harta dan tenaganya dalam rangka menghidupkan kembali identitas kebangsaan Melayu Patani dengan mendirikan sekolah Melayu yang berbasis ilmu Agama Islam dan melayu serta berbentuk lembaga formal. Maka dari itu penulis bermaksud untuk meneliti tentang peran pengurus masjid *Al-hidaah Al-islamiah* dalam pendirian Sekolah Melayu/TADIKA.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Apa saja Kebijakan Politik Pemerintahan Thailand Terhadap Komunitas Muslim (kebijakan terkait pendidikan)?
2. Bagaimana Respon Pengurus Masjid *Al-Hidayah Al-Islamiah* Terhadap Pendirian Sekolah Melayu/TADIKA ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

⁸<https://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/8416> 14: 47, 05-03-2018

1. Ingin Mengetahui Kebijakan Politik Pemerintahan Thailand Terhadap Komunitas Muslim
2. Ingin Mengetahui Respon Pengurus Masjid *Al-Hidayah Al-Islamiah* Terhadap Pendirian Sekolah Melayu/TADIK

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan kajian teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan terkait bidang politik khususnya tentang kebijakan

2. Kegunaan praktis

Sebagai salah satu referensi atau masukan buat pengurus masjid dan buat pemerintah Patani

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu “suatu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden”.⁹ Penelitian ini merujuk kepada pengurus *masjid Al-hidayah Al-islamiah* dalam pendirian Sekolah Melayu/TADIK di Desa Bendang dalam Provinsi Patani (Thailand selatan). Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan peran pengurus masjid dalam pendirian Sekolah Melayu/TADIK.

⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset sosial*, (Bandung : Mandur Maju, cet VIII, 1996), hlm.102.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian.¹⁰

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa deskriptif eksploratif riset yang mengklarifikasikan data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan peran pengurus masjid dalam pendirian Sekolah Melayu/TADIKA.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, yaitu hasil wawancara dengan responden, sumber data primer penelitian adalah pengurus-pengurus masjid di Desa *BendangDalam* . Terdapat 5 orang akan di wawancarakan.

b. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah buku buku yang berkaitan dengan masalah Sistem Pendidikan, Sosial, Politik, sejarah, karya ilmiah, website, serta buku buku yang berkaitan dengan penelitian yang didapatkan dari perpustakaan yang ada disekitar penelitian yang menjadi data sekunder untuk penelitian ini, guna untuk memperoleh data mengenai peran pengurus masjid dalam pendirian Sekolah

¹⁰ *Ibid*, hlm. 105

Melayu/TADIKA. Selain itu data sekunder berasal dari hasil wawancara dengan informan data yang teliti.

3. Metode pengumpulan data

a. Metode Interview

Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Metode ini dilakukan sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi mengenai peran pengurus masjid dalam pendirian Sekolah Melayu/TADIKA. Narasumber dalam wawancara ini yaitu 5 orang pengurus masjid.

b. Metode Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur - unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala gejala pada objek penelitian .Unsur unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.¹² Metode ini untuk memperoleh data- data dan mencatat mengenai peran pengurus masjid dalam pendirian Sekolah Melayu/TADIKA. Metode ini juga dapat bermanfaat untuk menjelaskan data yang objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologipenelitiankualitatif*, Remadjakarya (Bandung: 1989), Cet. 1. hlm. 148

¹²HadariNawawi,*InstrumenPenelitianSosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University 1995), hlm. 74.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah ”pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip juga termasuk buku-buku tentang pendapat , teori, dalil atau hukum - hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”.¹³ Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkapan. Data yang digali adalah data yang berkenaan dengan dokumen tertulis atau aktivitas pengurus masjid. Dalam kegiatan ini dokumentasi berperan sebagai alat kontrol data data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

d. Metode analisis data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu :”Digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan .”Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta fakta yang khusus, peristiwa - peristiwa yang konkrit” kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis, mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta fakta dan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan peran pengurus masjid dalam pendirian Sekolah Melayu/TADIKA.

¹³HadariNawawi, *InstrumenPenelitianBidangSosial*, (Jakarta: Gajah Mada University press,1998), hlm. 133.

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan, terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *“KEBIJAKAN TURKI TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR, DI BAWAH KEPEMIMPINAN PARTAI ADALET VE KALKINMA PARTAI (AKP) DARI TAHUN 2012-2016”* karya Tri Rachmad Dani, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017. Fokus kajian permasalahan adalah penelitian ini tentang Kebijakan Turki untuk bekerjasama dengan Myanmar dalam membantukan Etnis Rohingya terkait kemanusiaan.
2. Skripsi yang berjudul *“POLITIK PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI KUDUS PASCA G.30 S/PKI (1965-1998)”*, Karya Vita Vinia Ardisari, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah politik Pemerintah Indonesia terhadap Etnis Tionghoa di Kudus, yang menjadikan persaingan, sehingga membawa konflik diantara Etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi. Dan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan *Bakom-PKB* (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa) dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian diatas berbeda dengan apa yang sedang penulis teliti saat ini dalam hal ini penulis lebih berfokus pada Kebijakan politik

Pemerintahan Thailand terhadap komunitas muslim, yaitu studi kasus Respon pengurus masjid *Al-hidayah Al-islamiah* dalam pendirian Sekolah Melayu/TADIKAWilayah Patani Thailand Selatan, atas masalah yang dihadapi oleh *masyarakat* untuk lebih baik dari sebelumnya.



BAB II

Mengenal Beragam Kebijakan Politik Pemerintah Terhadap Minoritas

A. Pemerintah China Terhadap minoritas Muslim Uighur

Uighur adalah suku minoritas di wilayah Xinjiang, terletak di ujung Barat dan Barat Laut China. Suku uighur ini memiliki provinsi sendiri dengan status otonomi bernama Xinjiang-Uighur. Mayoritas suku Uighur adalah Muslim. “Uighur” artinya persatuan atau persekutuan. Awal mula masuknya Islam ke Xinjiang yaitu ketika masyarakat Uighur berperan sebagai perantara perdagangan antara China dengan Barat. Interaksi dengan pedagang Arab, Persia, dan Turki itulah yang membuat masyarakat Uighur mulai mengenal dan memeluk agama Islam. Jumlah Muslim Uighur pada tahun 2011 sekitar 8 juta orang. Sedangkan jumlah umat Muslim di China pada tahun 2011 sekitar 20 juta orang dari total penduduk China yang berjumlah 1,3 Milyar. Jadi, Muslim merupakan minoritas di China.

Ada beberapa konflik yang terjadi antara Muslim Uighur dengan pemerintah China dan konflik etnis antara suku Uighur dengan suku Han. Awalnya karena wilayah Xinjiang memiliki nilai geopolitik dan geoekonomi yang tinggi, serta potensi sumber daya alam yang besar seperti minyak dan pertambangan lainnya, maka Inggris, Jepang, Rusia, dan China berusaha menguasai wilayah Xinjiang. Pada tahun 1940-an, muncul Republik Turkestan Timur di sebagian Xinjiang, dan banyak warga Uighur merasakan itu adalah hak asasi mereka. Tetapi pada tahun 1949 Xinjiang dinyatakan masuk menjadi bagian dari China. Kebencian itu memuncak saat masyarakat Uighur ingin memisahkan diri, tetapi hal ini dapat diselesaikan oleh Mao Zedong dengan mengirimkan

tentara ke Xinjiang tahun 1949. Dan pada 1 Oktober 1955, secara resmi Xinjiang dijadikan provinsi dengan status daerah otonomi mengesampingkan fakta bahwa mayoritas penduduknya saat itu adalah suku Uighur.

Letak Xinjiang yang strategis membuat penguasa China selalu menekan masyarakat Uighur dari masa ke masa. Ada beberapa bentuk diskriminasi dari pemerintah China terhadap Muslim Uighur, yaitu:

1. Pada tahun 1990, pemerintah China melarang pembangunan masjid dan madrasah. Hal ini berujung pada konflik kekerasan antara umat Muslim di Xinjiang dengan pemerintah
2. Pada tahun 1996, pemerintah China menerapkan kebijakan Sertike Hard yaitu memperketat pengendalian terhadap kegiatan agama, membatasi pergerakan orang, dan menahan orang yang dicurigai mendukung gerakan separatis.
3. Pada 5 Juli 2009 terjadi konflik kekerasan antara suku Uighur dengan suku Han di Urumqi, ibukota Xinjiang. Penyebabnya karena suku Uighur menolak pelarangan-pelarangan dari pemerintah China di Xinjiang dan adanya perbedaan perlakuan terhadap suku Uighur dan suku Han. Akibat peristiwa ini, 184 orang tewas, 1700 orang terluka, dan 1434 Muslim Uighur diculik dan dihukum oleh pemerintah China.
4. Muslim Uighur dilarang berpuasa. Perusahaan swasta menawarkan makan siang selama bulan puasa kepada karyawan Muslim Uighur, bagi yang menolak untuk makan bisa kehilangan bonus tahunan bahkan pekerjaannya. Di sekolah-sekolah juga menyediakan makan siang selama bulan puasa dan melarang siswa dibawah 18 tahun untuk berpuasa dan

beribadah. Pemerintah juga memaksa restoran untuk tetap buka sepanjang hari.

5. Pemerintah China juga membatasi Muslim Uighur yang ingin beribadah ke masjid dan sholat jum'at berjamaah harus mendaftar dengan kartu identitas nasional mereka. Umat Muslim juga dimintamenandatangani semacam surat tanggung jawab yang isinya berjanji untuk tidak berpuasa dan sholat tarawih atau kegiatan keagamaan lainnya selama bulan Ramadhan.
6. Muslim Uighur juga sulit untuk melaksanakan ibadah haji karena tidak bisa mendapat paspor. Proses pembuatan paspor dipersulit dan pemerintah China juga membatasi biro perjalanan haji.
7. Muslim Uighur sulit mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 1949, suku Han di Xinjiang hanya sekitar 6%, tetapi saat ini meningkat menjadi 40%. Hampir semua perusahaan China lebih suka mempekerjakan suku Han daripada suku Uighur. Suku Han mendapat gaji empat kali lebih besar daripada suku Uighur padahal pekerjaannya sama.
8. Jumlah masjid dibatasi dan institusi keagamaan juga dibatasi secara ketat. Pemerintah juga memasang 17.000 kamera pengintai di Urumqi untuk mengawasi setiap kegiatan Muslim Uighur.

Berdasarkan teori kritik, ideologi digunakan untuk mencapai kekuasaan dengan menggunakan cara represif. Pemerintah China dengan ideologi komunis bersifat otoriter untuk mempertahankan kekuasaannya. Ideologi komunis yang dianut China juga ikut berperan dalam pengambilan keputusan dan cara pandang mereka mengenai masalah sosial. Dalam kasus Muslim Uighur ini, pemerintah

China tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan, penculikan, bahkan membunuh Muslim Uighur yang melakukan protes atau menentang pemerintah. Tindakan tersebut dilakukan pemerintah China karena khawatir akan berkembangnya gerakan-gerakan separatis yang dapat menggoyahkan kekuasaannya.

Teori selalu ditujukan untuk seseorang dan untuk tujuan tertentu. Jadi, ilmu pengetahuan tidak mungkin bebas nilai, harus bersifat subjektif yaitu berpihak pada yang lemah. Dalam kasus ini, negara bersifat menindas dan pihak yang ditindas adalah Muslim Uighur karena mengalami ketidakadilan seperti pelarangan-pelarangan dalam melaksanakan kegiatan agama, penindasan, sulit mendapat pekerjaan, dan walaupun wilayah Xinjiang sangat kaya akan minyak dan hasil tambang lainnya, tetapi masyarakat Muslim Uighur tidak menikmati hasilnya. Selain itu, masalah lainnya yaitu konflik etnis antara suku Uighur yang merupakan minoritas dengan Suku Han yang merupakan suku mayoritas terbesar di China. Penyebabnya karena diskriminasi dari pemerintah China yang cenderung lebih meng-anak emaskan suku Han dan mengucilkan suku Uighur.

Oleh karena itu, teori kritik bertujuan pada emansipasi manusia, membebaskan manusia dari ketidakadilan dan penindasan. Caranya melalui revolusi secara damai. Masyarakat Muslim Uighur melakukan protes dengan demonstrasi secara damai, tetapi justru mendapat tindak kekerasan dari pihak militer China. Suara dan aspirasi Muslim Uighur yang ingin melakukan protes terhadap pemerintah China dibungkam agar tutup mulut, diancam, bahkan diawasi dengan kamera pengintai. Permasalahan Muslim Uighur ini tidak selesai-selesai karena pemerintah China hanya berfokus pada ekonomi, sehingga kurang

memperhatikan masalah sosial. Konflik etnis antara suku Uighur dengan Suku Han juga menjadi masalah sosial yang termarginalisasi.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah Muslim Uighur berdasarkan teori kritik adalah peran civil society (masyarakat madani) melalui aksi komunikatif yang bertujuan untuk emansipasi. Aksi komunikatif yaitu dibentuknya suatu dialog terbuka sebagai ajang komunikasi untuk mempertemukan berbagai kepentingan. Konsep ini disebut dengan model dialogis. Jadi, dialog terbuka dapat dilakukan antara masyarakat madani seperti aktivis, pelajar, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ataupun organisasi Islam dari masyarakat Uighur dengan pemerintah China. Sehingga dapat dicari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah antara Muslim Uighur, suku Han, dan pemerintah China agar tidak terjadi lagi konflik kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa.¹⁴

B. Kebijakan pemerintahan Afrika selatan terhadap minoritas

Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990.

Hukum apartheid dicanangkan pertama kali di Afrika Selatan, yang pada tahun 1930-an dikuasai oleh dua bangsa kulit putih, koloni Inggris di Cape Town dan Namibia dan para Afrikaner Boer (Petani Afrikaner) yang mencari

¹⁴ http://www.kompasiana.com/marinaikasari/perlakuan-pemerintah-china-terhadap-muslim-uighur_550d928da333119a1e2e41bd/04-09-2017

emas/keberuntungan di tanah kosong Afrika Selatan bagian timur atau disebut Transvaal (sekarang kota Pretoria dan Johannesburg).

Setelah Perang Boer selesai, penemuan emas terjadi di beberapa daerah di Afrika Selatan, para penambang ini tiba-tiba menjadi sangat kaya, dan kemudian sepakat untuk mengakhiri perang di antara mereka, dan membentuk Persatuan Afrika Selatan.

Melalui kebijaksanaan ini, penduduk Afrika Selatan digolongkan menjadi empat golongan besar, yaitu kulit putih atau keturunan Eropa, suku bangsa Bantu (salah satu suku bangsa di Afrika Selatan), orang Asia yang kebanyakan adalah orang Pakistan dan India, dan orang kulit berwarna atau berdarah campuran, diantaranya kelompok Melayu Cape. Pemisahan suku yang dilakukan di Afrika Selatan ini mendapat tanggapan dunia internasional. Bahkan Majelis Umum PBB mengutuk perbuatan itu. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut juga mendapat tanggapan yang serius dari rakyat Afrika Selatan. Di Afrika Selatan sering terjadi gerakan-gerakan pemberontakan untuk menghapus pemerintahan Apartheid. Gerakan yang terkenal dilakukan oleh kalangan rakyat kulit hitam Afrika Selatan dipelopori oleh African National Congress (ANC) yang berada di bawah pimpinan Nelson Mandela. Pada tahun 1961, ia memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di dalam rumah. Aksi tersebut ditanggapi oleh pemerintah Apartheid dengan menangkap dan kemudian menjebloskan Mandela ke penjara Pretoria tahun 1962. Nelson Mandela baru dibebaskan pada tanggal 11 Februari 1990 pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk. Pembebasan Nelson Mandela membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan dalam memperjuangkan penghapusan pemerintahan

Apartheid. Pada tanggal 2 Mei 1990 untuk pertama kalinya pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang Nonrasial. Pada tanggal 7 Juni 1990 Frederik Willem de Klerk menghapuskan Undang-undang Darurat Negara yang berlaku hampir pada setiap bagian negara Afrika Selatan.

Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Nelson Mandela dalam menegakkan kekuasaan tanpa adanya rasialisme di Afrika Selatan dan menghapuskan kekuasaan Apartheid memakan waktu yang cukup lama. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan negerinya baik perjuangan yang dilakukan di dalam negerinya, agar mendapat dukungan dari seluruh rakyatnya, maupun perjuangan yang dilakukan di luar negeri, yaitu untuk mendapatkan pengakuan atas perjuangannya dalam menghapuskan kekuasaan Apartheid di Afrika Selatan. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Nelson Mandela tersebut mulai menampakkan hasil yang menggembirakan, ketika pemerintah minoritas kulit putih di bawah pimpinan Frederik Willem de Klerk memberikan angin segar kebebasan bagi warga kulit hitam.

Pada tanggal 21 Februari 1991, di hadapan sidang parlemen Afrika Selatan, presiden Frederik Willem de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi system politik Apartheid. Pengumuman itu diikuti dengan penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat kekuasaan Apartheid, yaitu :

1. Land act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki "homeland" di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan.

2. Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam.

3. Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing.

Penghapusan undang-undang tersebut diikuti dengan janji pemerintahan Frederik Willem de Klerk untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial (pemilu multirasial). Garis politik yang ditempuh Presiden De Klerk tersebut menghentak banyak pihak dan membangkitkan semangat perjuangan orang-orang kulit hitam dalam rangka memperjuangkan Afrika Selatan tanpa adanya perbedaan rasialais.

Dari banyak sekali "homeland" (bahasa Afrikaans: Tuisland) yang dibentuk/dipisahkan dari Afrika Selatan yang "putih". Empat menyatakan kemerdekaannya; yaitu negara yang dikelompokkan menjadi TBVC (Transkei, Bophutatswana, Venda, dan Ciskei) dari suku bahasanya. Frederik Willem de Klerk adalah orang yang mengakhiri masa suram ini dengan pidato-pidatonya yang reformatif. Negara Republik Afrika Selatan setelahnya ini akan berdiri dengan pimpinan demokratis Nelson Mandela yang mempunyai nama alias "Rolitlatla" (Pengambil Ranting/pencari gara-gara)¹⁵

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Apartheid> 05-07-2017

C. Kebijakan pemerintahan Jerman terhadap minoritas ([Masyarakat Menangani Arus Pendatang](#)), MuslimDi Jerman menetap 16,4 juta orang dengan riwayat pascamigrasiSumber:Martin Stoever/Bongarts/Getty Images

Diagram [Masyarakat Imigrasi Modern](#)

Jerman berkembang menjadi negara imigrasi yang disukai, integrasi merupakan pokok penting. Sebanyak 16,4 juta warga dengan riwayat pascamigrasi menetap di sini.

Jerman telah masuk ke kelompok negara tujuan migrasi paling utama di dunia. Menurut data Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), tahun 2014 Jerman merupakan negara yang paling banyak dituju oleh migran setelah Amerika Serikat. Selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada negara lain di antara ke-34 negara anggota OECD yang mencatat kenaikan angka pendatang setinggi di Jerman. Sejak reunifikasi tahun 1990 terdapat 21 juta orang yang datang ke Jerman untuk menetap – sedangkan hanya 16 juta orang yang meninggalkan Jerman. Tahun 2013 tercatat angka imigrasi tertinggi sejak 1993, yaitu 1,2 juta pendatang. Neraca perpindahan penduduk pada tahun 2013 menunjukkan pertambahan sebanyak 437.000 orang.

Secara keseluruhan 7,2 juta pemegang paspor asing tinggal di Jerman. Namun jumlah penduduk dengan riwayat pascamigrasi lebih besar, yaitu 16,4 juta orang. Termasuk dalam kelompok ini adalah para imigran, warga negara asing yang lahir di Jerman, dan orang yang ayah atau ibunya adalah imigran atau warga negara asing. Kelompok tersebut mencakup 20 persen lebih sedikit dari jumlah

keseluruhan penduduk Jerman, sekitar 10,5 juta orang di antaranya bermigrasi secara mandiri. Sebanyak tiga perempat lebih para imigran berasal dari salah satu negara Eropa lainnya. Menurut Laporan Migrasi 2013, bagian terbesar pendatang pada tahun itu berasal dari Polandia dan Rumania. Minoritas etnik terbesar di Jerman terdiri dari hampir tiga juta warga keturunan Turki (di antaranya 1,3 juta warga negara Jerman). Banyak imigran generasi pertama datang ke Jerman sebagai pekerja tidak terampil berdasarkan Kesepakatan Perekrutan Tenaga Kerja dengan Turki 1961. Kini pendatang asal Turki mencakup pula mahasiswa, pengusaha dan tenaga ahli. Kelompok besar lainnya berasal dari bekas Yugoslavia atau negara-negara pecahannya. Dewasa ini 56 persen warga dengan riwayat migrasi memiliki paspor Jerman. Tahun 2014 sebanyak 108.420 warga negara asing dinasionalisasikan. Kelompok transmigran keturunan Jerman yang pindah dari negara-negara pecahan Uni Soviet mencakup sekitar 4,5 juta orang dan merupakan kelompok pendatang terbesar.

Sumbangan para migran bagi perkembangan di bidang kemasyarakatan dan perekonomian di Jerman cukup besar. Pemerintah Federal ber- tekad untuk tetap memungkinkan imigrasi, antara lain untuk mengatasi kekurangan akan tenaga terampil yang diakibatkan oleh perubahan struktur demografis. Menurut hasil studi Bertelsmann-Stiftung, sampai tahun 2050 jumlah penduduk Jerman usia produktif akan me-nurun dari 45 juta menjadi kurang dari 29 juta. Tanpa adanya arus imigrasi tetap, tekanan terhadap sistem jaminan sosial akan meningkat. Khususnya sistem jaminan hari tua didasarkan atas semacam perjanjian antargenerasi. Intinya, generasi yang bekerja sekarang membayar iuran untuk membiayai uang pensiun generasi yang sudah berhenti dari dunia kerja –

dengan mengharapkan bahwa kelak generasi yang akan datang tentu akan membiayai uang pensiun mereka melalui iurannya pula. Dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga terampil, semakin banyak juga imigran dengan kualifikasi baik datang ke Jerman. Bagian alumni perguruan tinggi antara pendatang baru tersebut lebih tinggi daripada bagian akademisi rata-rata dalam masyarakat Jerman.

Pengeluaran izin tinggal diperlancar oleh Uni Eropa, terutama dengan penerbitan Kartu Biru UE, dokumen sentral yang memudahkan akses ke pasaran tenaga kerja Jerman bagi tenaga ahli lulusan perguruan tinggi dari negara bukan anggota UE. Sedang dirancang undang-undang yang akan memadukan peraturan imigrasi yang berbeda-beda.

Integrasi Sebagai Tujuan Penting Kebijakan Migrasi

Dengan pembaruan hukum kewarganegaraan tahun 2014 diintroduksi kewarganegaraan ganda. “Kewajiban menjatuhkan pilihan” dihapuskan bagi anak yang orangtuanya warga negara asing dan yang lahir dan besar di Jerman setelah tahun 1990. Sebelumnya anak tersebut wajib memutuskan sampai batas umur 23 tahun kewarganegaraan tunggal yang dipilih.

Integrasi para imigran dalam masyarakat Jerman semakin baik. Jumlah pendatang yang bekerja naik dengan lima persen sejak tahun 2007., Di lain pihak masih ada kekurangan, terutama di bidang pendidikan. Jumlah remaja berketurunan asing yang tidak dapat membaca dan menulis dalam bahasa Jerman dengan lancar tetap tinggi. Lebih dari 30 persen orang berusia 20 sampai 29 tahun

asal luar Jerman tidak berhasil lulus pendidikan kerja. Pemerintah Jerman berupaya meningkatkan partisipasi kelompok tersebut dalam pendidikan.

Tugas khusus lainnya dalam rangka kebijakan migrasi dan integrasi adalah perlindungan pengungsi. Konstitusi menjamin hak asasi atas suaka bagi korban persekusi politik. Dengan jaminan itu Jerman menegaskan tanggung jawab historis dan humaniternya. Dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah peminta suaka naik secara tajam. Pada tahun 2004 sekitar 50.000 orang meminta suaka, tahun 2014 jumlahnya meningkat menjadi 200.000 orang lebih. Dengan adanya arus pengungsi yang terus-menerus dari daerah-daerah perang dan krisis di Suriah, Irak dan Afghanistan, Badan Federal Urusan Migrasi dan Pengungsi (BAMF) diperkirakan menerima antara 800.000 dan satu juta surat permohonan suaka, . Jerman menerima tantangan ini, dan sekaligus berupaya bersama-sama mencari pemecahan masalah peng-ungsi di Eropa dalam semangat solidaritas.

Related Content

[Keanekaragaman yang Mengayakan](#)

[Jerman adalah negara terbuka yang menunjukkan pluralisme cara hidup.](#)

[Perubahan demografis akan berperan besar di tahun-tahun mendatang.](#)

[Cara Hidup yang Beragam](#)

[Berbagai bentuk baru hidup bersama tumbuh dalam masyarakat Jerman.](#)

[Ada bantuan terarah untuk usaha menyesuaikan pekerjaan dengan tugas keluarga.](#)

[Peran Serta Masyarakat Madani](#)

Peran serta masyarakat madani di Jerman sangat besar. Banyak orang bertugas sebagai sukarelawan, yayasan semakin berarti penting.¹⁶

D. Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap komunitas

Konsep Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundangun dengan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHP erdata) dan Wetboek van Koophandel voor Indonesia (KUHD Agang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 Nomor 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat di samping hukum kolonial.

Sejatinya, asas persamaan di hadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan "hanya" dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi. Undang-

¹⁶ <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/masyarakat/menangani-arus-pendatang/> 21-09-2017/06:16

Undang Dasar 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dalam Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. 'No man above the law', artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada di atas hukum.

Menurut Ramly Hutabarat, makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Teori equality before the law individu lain dan memberi sanksi kepada mereka yang melanggar. Ketiga, kewajiban memenuhi HAM (to fulfill). Negara harus proaktif dengan mendukung intervensi (positive measures) sehingga hak-hak asasi setiap orang dilindungi, dan proses pemenuhan/perolehan kembali hak-hak asasinya yang belum dapat dipenuhi melalui usaha sendiri, kini proses pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Konsep Negara hukum ternyata sangatlah erat kaitannya antara negara hukum

dengan masalah HAM, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah, dan HAM sebagai isi. Pelaksanaan HAM di Indonesia memerlukan koordinasi antar pelbagai unsur, menyadari bahwa persoalan-persoalan HAM di Indonesia masih sangat luas baik hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak untuk berkembang (right to development) dan sebagainya.¹⁸ Berbicara keadilan sosial, tidak ada pemisahan antara hak sipil politik dengan hak ekonomi sosial dan budaya. Kedua induk HAM ini harus sejalan beriringan. Tidak ada yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya.

Tentang equality before the law bukan hanya dalam satu sisi diatas. Hak dibidang politik misalnya; hak dasar dibidang politik tercermin dalam Pasal 28 UUD 1945 yaitu "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan maupun lisan ditetapkan dalam undang-undang". Selanjutnya Pasal 27 ayat (1), "segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya". Penjelasan pasal itu .¹⁷

¹⁷ RECHTS VINDANG, "PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA DALAM, MEWUJUDKAN Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum", vol, 6 no.1, 2017, hlm 131, 10:29, 05- 03-2018

BAB III

MENGENAL PATANI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN THAILAND

A. Gambaran Umum Patani

1. Islam Masuk Di Patani

Kedudukan Patani di semenanjung siam yang sertategis dari segi geografi, telah menyebabkan kota itu menjadi tempuan pedagang-pedagang asing baik dari Barat atau Timur untuk singgah sama ada untuk beristirahat atau berdagang. Dalam masa yang singkat saja Patani telah muncul sebagai sebuah kerajaan yang penting, maju dari segi ekonomi serta stabil dari segi politik dan pemerintahan.

Dasar perhubungan antara bangsanya yang baik telah menyelamatkan Patani daripada jatuh kepada penjajahan siam, portugis, dan belanda. Agama Islam juga telah membawa angin perubahan yang bermakna kepada Patani. D'Eredia, seorang pahlawan Portugis, telah menulis dalam tahun 1613 bahwa Islam itu telah bertapak di Patani lebih awal daripada malaka (Mills 1930). Dalam hal ini, Teeuw dan Wyatt berkeyakinan bahwa Islam telah bertapak di Kuala Berang, Terangganu, yaitu pada sekitar 1386-87 T.M (Teeuw & Wyatt 1970, 4). *Phya tu Antara*, yang memeluk Islam melalui seorang ulama dari Pasai, *Syikh Said*, telah menukar mananya kepada Nama Ismail yaitu Sultan Ismail Syah Zillullah Dil Alam (Teeuw & Wyatt 1970, 68-69). Semenjak itu, Patani telah menjadi tumpuan saudagar-saudagar Islam dan menjadikannya

sebagai pusat perdagangan Timur-Barat yang terkenal di rantau ini, Patani bertambah maju apabila malaka jatuh Portugis pada tahun 1511.¹⁸

Sejarah awal dibentuk Negeri ini masih lagi diselimuti kekaburan. Dalam catatan sejarah tidak dapat dipastikan asal-usul atau tarikh sebenar kerajaan Melayu Patani didirikan. Mengikut catatan pelawat-pelawat China yang membuat perhubungan dengan Negeri-negeri Asia Tenggara pada abad ke 2 Masehi, sebuah Negeri bernama “Lang-ya-shiu” atau Langkasuka (Paul Wheatley 1961, 387-412) sudah pun wujud ketika itu. Berpandukan catatan tersebut ahli-ahli Sejarah Eropah percaya bahwa Negeri Langkasuka yang terletak di Pantai timur Semenanjung Tanah Melayu antara Senggora (Songkhla) dan Kelantan itu adalah lokasi asal Negeri Patani. Adalah dipercayai bahwa ibu Negerinya pada masa itu terletak di sekitar daerah Yarang Patani adalah sebuah kerajaan yang termaju di Semenanjung Tanah Melayu dan sebuah pelabuhan yang penting sejak kurun ke-8 Masehi karena Teluk Langkasuka (Teluk Patani sekarang) sangat sesuai dijadikan tempat kapal-kapal dagang berlabuh dan berlindung daripada ribut tengkujuh.

Paul Wheatly menjelaskan bahwa kerajaan Langkasuka menguasai jalan perdagangan timur-barat melalui Segenting Kra dan kekuasaannya meliputi kawasan Semenanjung sehingga ke Teluk Benggala. Kerajaan Melayu Langkasuka wujud sehingga menjelang abad 13 dan diganti pula oleh Kerajaan Melayu Islam Patani Darussalam.

¹⁸ Sejarah perjuangan melayu patani 1785-1954, NIK ANUAR NIK MAHMUD, penerbit Universitas kebangsaan Malaysia Bangi 2006, <http://www.penerbit.ukm.my>, hlm 16

Persoalan bagaimana Langkasuka bertukar menjadi Patani masih belum dapat dipastikan oleh para pengkaji sejarah kerana tidak ada sebarang catatan sejarah yang jelas mengenainya. A.Teeuw dan Wyatt berpendapat bahwa Patani telah ditubuhkan sekitar pertengahan abad ke-14 dan ke-15. Pendapat mereka berasaskan kepada tulisan Tomes Pires dan lawatan Laksamana Cheng Ho ke rantau ini dalam tahun 1404-1433 T.M. (Teeuw & Wyatt 1970,3). Mengikut Hikayat Patani pula, Kerajaan Melayu Patani berasal dari Kerajaan Melayu yang berpusat di Kota Mahligai yang diperintah oleh Phya Tu Kerab Mahayana (Teeuw & Wyatt 1970,68).

Oleh kerana kedudukan kota Mahligai itu terlalu jauh ke pedalaman dan sukar untuk didatangi oleh pedagang-pedagang telah menyebabkan Phya Tu Antara, anak Phya Tu Kerab Mahayana, memindahkan pusat kerajaannya ke sebuah perkampungan nelayan yang kemudiannya diberikan Nama "Patani", dipercayai berpusat di *kampong Grisek* dalam wilayah Patani sekarang ini.

Kedudukan Patani di Semenanjung Siam yang strategik dari segi geografi, telah menyebabkan kota itu menjadi tumpuan Pedagang-pedagang Asing baik dari barat atau timur untuk singgah sama ada untuk beristirahat ataupun berdagang. Dalam masa yang singkat saja Patani telah muncul sebagai sebuah kerajaan yang penting, maju dari segi ekonomi serta stabil dari segi politik dan pemerintahan. Dasar perhubungan antara bangsanya yang baik telah menyelamatkan Patani daripada jatuh kepada penjajah-penjajah Siam (Thailand), Portugis dan Belanda maupun Inggris.

Agama Islam juga telah membawa angin perubahan yang bermakna kepada Patani. D' Eredia, seorang pelawat Portugis, telah menulis dalam tahun 1613 M bahwa Islam telah bertapak di Patani lebih awal daripada Melaka (Mills 1930).¹⁹

Dalam hal ini, Teeuw dan Wyatt berkeyakinan bahwa Islam telah bertapak di Kuala Berang, Terengganu, yaitu pada sekitar 1386 – 87 T.M. (Teeuw & Wyatt 1970, 4). Phya Tu Antara, yang memeluk Islam melalui seorang ulama dari Pasai, Syeikh Said, telah menukar namanya kepada Nama Islam yaitu Sultan Ismail Syah Zillullah Dil Alam (Teeuw & Wyatt 1970, 68-69). Semenjak itu, Patani telah menjadi tumpuan saudagar-saudagar Islam dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan Timur-Barat yang terkenal di rantau ini. Patani bertambah maju apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 M.

Satu hal lain yang menyebabkan tepat kuatnya kesetiaan rakyat dan rasa keterikatan kultural mereka dengan Patani adalah peran historisnya sebagai pusat Islam di Asia tenggara. Bahkan, karabat-karabat Raja dan kaum bangsawan tetap merupakan simbol kemerdekaan Patani selama banyak desawansasetelah Negeri itu secara formal dimasukkan kedalam kerajaan Thai dalam 1901, dan lembaga-lembaga keagamaan di Patani dan daerah-daerah sekitarnya berfungsi sebagai penghubung antara golongan-golongan elit itu dan rakyat pada umumnya.

Seperti di setiap masyarakat Muslim lainnya, kaum ulama berfungsi sebagai kekuatan yang mengabsahkan kekuasaan yang berlaku dan dukungan mereka sifatnya menentukan bagi pemeliharaan dan penggunaan kekuasaan politik. Dalam kasus Patani dan Daerah-daerah bawahannya, kaum ulama memainkan suatu peran yang sifatnya menentukan dan terus memberikan inspirasi yang nyata kepada perjuangan untuk memperoleh identitas yang terpisah dan bahkan kepada gerakan-gerakan separatis. Kekuatan inspirasi itu berakar dalam peran Patani dalam sejarah sebagai "Tempat kelahiran Islam".

Kapan tepatnya daerah Patani beralih keagamaan Islam, hingga kini belum diketahui dengan pasti (Winzeler 1974: 260, Franser 1960: 20-26, Teeuw dan Wyatt 1970: 4). Pada tahun 1613, d'Eredia memperkirakan bahwa Patani masuk Islam sebelum Malaka, yang secara tradisional dikenal sebagai "Darussalam tempat damai) pertama" dikuasai itu (Mills 1930 : 49). Dalam penelitiannya mengenai kedatangan Islam di Indonesia, G.W.J. Drewes menemukan bahwa di Terangganu, yang merupakan salah satu tetangga Patani, Agama baru itu sudah dianut secara mapan menjelang 1386, atau "1387 paleng lambat". Dari penemuan ini, Wyatt dan Teeuw (1970: 4) menarik kesimpulan bahwa "Tidak ada alasan mengapa (Agama itu) belum sampai di Patani menjelang tahun itu terutama jika di ingat bahwa Patani terkenal sebagai sebuah pusat Islam yang awal".

Sejalan dengan tradisi simbiosis antara Agama dan sistem pemerintahan di Asia Tenggara (Smith 1978), dan kelaziman di kalangan pemegang kekuasaan untuk menerima "Idiologi yang memberi legitimasi" sebelum rakyat sendiri memelulkannya, maka Islam dianut oleh keluarga para raja, yang para

anggotanya lalu menjadi pendukungnya berkat hubungan mereka yang akrab dengan kaum ulama.

Dharma (Moralitas atau kewajiban seperti yang ditafsirkan oleh kaum Brahmin) dan artha (Tindakan politik-ekonomi atas dasar kepentingan diri sendiri di pihak penguasa) merupakan dua konsep Hindu-Buddhis yang diterima secara luas sebagai landasan legitimasi Nagara di Asia tenggara pra-islam.

Setelah datangnya Islam, konsep Negara/Agama menjadi dikotomi Melayu Islam yang menyatakan hubungan mistis yang sama. Di Patani, seperti juga di Negeri-negeri Islam lainnya dikawasan itu pada saat orang beralih keagama Islam, Agama baru itu dengan segera memperoleh status politik. Semenjak saat itu, daerah Patani mulai bergeser menjauhi pusat kekuasaan politik Thai dan membina hubungan-hubungan dengan dunia Melayu, dengan Islam sebagai faktor pemersatunya.

Pada puncak kekuasaan Patani selama awal abad ke-17, diletakkanlah dasar-dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Ini dimungkinkan oleh hubungan yang semakin intensif antara Negeri Arab, yang merupakan pusat Islam, dan Asia tenggara, yang ketika itu pusat perdagangannya adalah Patani (Adersaon 1980: 46, Wyatt dan Teeuw 1790: 297, Hall 1968: 219). Ketika Negara-negara kolonia barat memperoleh tempat berpijak disemenanjung Melayu, Patani sudah menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang menulis karya-karya keagamaan yang orisinal dan menerjemahkan karya sarjana-sarjana Arab yang masyhur untuk khalayak membaca Melayu.

Menjelang pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19, Patani benar-benar patut dijuluki “tempat kelahiran Islam di Asia tenggara” (Winaler 1975 : 92, Wyatt dan Teeuw 1970 : 4). Bahkan seorang Patani asli, Daud ibn Abdillahi ibn idris Al-Fatani, yang dalam 1890 menulis banyak risalah tentang Teologi Islam (Ushuluddin terkemuka mengenai ilmu hukum (Fiqh), diakui sebagai salah satu seorang ulama terkemuka mengenai ilmu-ilmu Islam di Asia tenggara (salle 1974: 91, Abdullah 1967:131-137). Yang bakannya tidak relevansi dengan situasi gerakan kemerdekaan Patani sekarang ini adalah kenyataan bahwa, para sarjan besar Patani zaman dahuku itu mempunyai lingkaran-lingkaran murid dan pengikut sendiri dikakah, pusat kerohanian dunia Islam, dan dengan dimakian mereka memperluas pengaruhnya melalui murid-muridnya yang berasal dari segala penjuru dunia Islam di Asia tenggara. Pada saat ini, sentimen yang mendukung gerakan itu berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Sebab mereka pernah mempunyai hubungan keagamaan dengan banyan lembaga keagamaan di Patani.

Masa kejayaan yang sudah lampau itu, yang dilambangkan oleh kaum bangsawan dan hubungan kaum karabatan mereka dengan keluarga raja-raja Melayu dan oleh itra Patani sebagai “tempat kelahiran islam” di kawasan itu, hanya sampai tingkat tertentu saja dapat membangkitkan suatu identitas Patani yang terpisah. Momentum perjuangan kemerdekaan dengan mudah dapat surat, begitu keluarga-keluarga itu docopot dari kekuasaan dan pengaruhnya. Sekarang setelah dibentuk banyak lembaga pendidikan untuk menggantikan madrasah yang tradisional di Patani, sumbangannya ilmu pengetahuan islam di masa lampau tidak akan dapat menarik untuk selama-lamanya perhatian umat

islam Asia tenggara kepada nasibnya. Yang paling penting bagi kelanjutan identitas Patani yang kuat dan yang mendukung gerakan yang pembebasannya adalah sikap rakyatnya sendiri tidak kenal kompromi. Orang-orang Melayu Muslim Patani memiliki apa yang oleh Milton Gordon dinamakan suatu *shared sense of peoplehood*, suatu rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa (Plax 1976: 20). Perasaan sebagai golongan yang terpisah dari golongan bangsa Thai yang dominan serta aparat birokrasinya itulah, yang dapat diidentifikasi sebagai faktor tunggal yang paling menentukan sifatnya, yang memungkinkan konflik dan kekerasan terus berlangsung hingga sekarang di muangthai bagian selatan. Dengan kata lain, ini menyangkut masalah etnisitas.²⁰

2. Pendirian Majelis Agama Islam

Sejurus perang dunia kedua berakhir, Phibun Soongkran digantikan oleh perdana menteri Nai Kuan Amphaiwong yang turut mengubah dasar kerajaan Siam. Pergolakan berlaku di Bangkok menggusarkan hati tokoh politik Siam terutamanya Pridi Phanomyong pemimpin yang pertubuhan *Free Thai* yang tidak menyetujui dasar Phibun Songgram, berkaitan pengaruh Jepang. Menerusi kerajaan Khuan Amphaiwong, Pridi Phanomyong dilantik menjadi menteri dalam negeri, di samping menyandang Pemang Raja Siam Ananda Mahidol atau Rama IV (*Pusamrech Rackan Tea Prang*). Beliau merupakan tokoh seorang politik Siam yang sifat terbuka dan menunjukkan rasa simpati terhadap permasalahan orang Melayu Patani. Pada 3 Mei 1945 Tengku Abduljalal, sebagai menteri dalam negeri perdana menteri Kuang Amphaiwong,

²⁰

Surin Pitsuwan, *Islam Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, LP3 ES lembaga penelitian dan penerapan ekonomi dan sosial, cetakan pertama, Desember 1989, Jakarta, hlm. 36

supaya dihapuskan dasar kebudayaan Rattaniyom. Susulan itu tiga hari kemudian pada 8 Mei 1945 kerajaan Siam meluluskan akta undang-undang pentadbiran mengenai hal Ehwal Islam (*praracha Bunyak Sasanupatham Fai Islam*). Alasannya, Oleh sebab perlembagaan Siam memberikan kebebasan beragama kepada rakyat jelata dengan raja Siam bertindak sebagai pelindung Agama, maka dengan timbang kenyataan bahwa terdapat setengah penduduk negara Siam yang menganuti Agama Islam. Adalah wajar bahwa orang Islam mesti dibantu dan diberi perlindungan dalam hal ihwal.

Pengisyarat akta tersebut dianggap suatu muslihat kerajaan Bangkok untuk meredakan ketegangan di wilayah-wilayah Patani akibat kekecewaan terhadap pihak British selepas perang dunia kedua. Pada 22 Julai 1945 melalui pengaruh Pribadi Phanomyong kerajaan Khuan Amphaiwong bertindak menghidupkan semua jawatan Chularajmontri. Raja Siam Ananda Mahidul berkenan melantik yang dipertua, Syaikhul Islam yang diperperankan sebagai pusat agama Islam Thailand (*kamakang islam haeng pratet tahi*). Pemilihan haji Syamsuddin Mustafa sebagai yang dipertua, Chularatamontri yang pertama sejajar dengan pelantikan ahli jawatan kuasa pusat Agama Islam peringkat kebangsaan. Chularatamontri dibentuk sebagai menjadi pemimpin kerohanian seluruh umat Islam Thailand agar dapat menasihati raja Siam dan kerajaan Siam dalam semua perkara berkaitan Agama Islam. Kepada sahabat kepercayaannya Chaem Promyong, justru Pridi Phanomyong berkata “Apa yang kamu jalankan, itulah yang, sebaik-baiknya yang saya akan lakukan” tugas pertama haji Syamsuddin Mustafa seorang pergi kepatani menemui pemimpin masyarakat Islam dan para alim ulama.

Menurut haji Syamsuddin Mustafa kerajaan siam kini bersedia meluluskan akta mengenal penduduk islam serta bercadang semua pelantikan jawatan kodhi (Datok Yutitam)serta mewujudkan majlis Agama islam setiap wilayah. Sambil berpesan bagi memudahkan pelantikan kodhi dan ahli jawatan kuasa, calonnya pasti membuat pessediaan terlebih dahulu. Kodhi adalah pegawai kerajaan di mahkamah, pemilihannya masti dilakukan dengan persetujuan semua imam wilayah masing-masing. Fungsinya sebagai penasihat atau rujukan hakim di mahakamah sewaktu memutuskan hukuman mengenai kes keluarga dan harta pusaka menurut landasan islam.

Keputusan tersebut ditubuhkan majlis Agama Islam wilayah(*kamakan islam prachang changwad*) bagi wilayah Patani, Yala, Naratiwat dan Stul. Tugasnya mengurus masalah nikah, talak, rujuk, zakad, dan harta pusaka, sebelum dibuat pengaduan sesuatu kes dimahkamah awam kerajaan. Institusi ini mewujudkan jawatan seperti yang dipertua, Timbalan yang dipertua, Bendahara dan dibantu seramai 15 Orang ahli jawatan kuasa majlis (*kamakan islam prachang changwad*)dan surau serta kampung seluruh Patani, Yala, Naratiwat,dan Setul. Sebagai Chularajmontri atau Shaikhul Islam, tugas haji syasuddin Mustafa menjadi wakil antara pihak kerajaan siam dengan penduduk islam. Di samping itu biliau berperanan mengendurkan ketegangan politik Patani di sebabkan pemerintah kuku besi regim Phibum Songgranm, sebelum itu kerajaan berharap dengan pembentuk Ahli jawatan majlis Agama islam Wilayah pemilihan imam masjid atau surau wilayah masing-masing

dapat berjalan lancar. Antara syarat penting catonnya masti terdiri dari pada tokoh masyarakat islam yang berpengaruh dan dihormati.²¹

Pada tanggal 9 Agustus 1947 melalui surat Kementerian Kehakiman Bangkok. 5385/2490 jelas memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Selepas mendapat jawaban itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan tentang pelantikan Qadi (Datok Yuttitam) dan mula mengumpulkan kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.

Majlis Agama Islam diangkat, oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama, ketua disini disebut dengan "Dato Yuttitam" penulis ingin memberi pengertian dengan kata "Datok Yuttitam" yang didapat ini dari ketua Majlis Agama Islam Patani, didalam bahasa "Thai" atau bahasa "Siam" yang sudah penulis terjemah kedalam bahasa Indonesia. "pelantikan Datok Yuttitam pada masa dulu itu harus ada imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu muncul bukti bahwa gubernur Stul mengundang Imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitam, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.

Apabila tidak dilantik oleh Raja dengan demikian mengakibatkan pelantikan Datok Yuttitam itu tidak sempurna oleh karena itu Qadi dalam pandangan Islam harus mendapat pelantikan dari Maha Raja di negeri itu

²¹ Tuan guru haji sulong GUGUSAN CAHAYA PATANI, mohd. Zamberi Abdulmalik, ANJUNG MEDIA RESOURCES, Kuala lumpur 2014. hlm 121

sendiri karena Datok Yuttitam sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut Syari'ah Islam dalam ilmu fara'id. Pasal 35 mengatakan bahwa “wali hakim adalah orang yang dapat pelantikan dari maha Raja atau kalangan Imam” Dalam pasal 36 mengatakan bahwa “menguasa dan fungsi didalam kasus pernikahan bagi perempuan yang sudah baliq”. Oleh karena itu jika Maha Raha negara itu tidak dilantikan lagi, maka yang harus diselesaikan adalah Imam untuk melanjutkan Datok Yuttitam, menurut tata cara diatas supaya dapat sempurna pelantikan Datok Yuttitam mengikut pandangan Syari'ah Islam.

Didalam menyelesaikan suatu kasus Datok Yuttitam pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqh dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Dengan demikian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttitam diperintah pada tahun 2472 B. (Budha) untuk menterjemahkan dari bahasa “melayu, Arab, Ingris, ke bahasa Siam dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.

Setelah diterjemahkan panitia penasihat peradilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan “Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga Dan Warisan” dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku Hukum tersebut turun temurun. Sehingga sampai dengan pelantikan pemerintah baru, pihak kerajaan Siam melantikan salah seorang yang beragama Budha menjadi pemerintah yaitu

Coompul.Poe.Pi'Bulsongkram menjadi pemerintah, waktu itu kebetulan perang dunia yang kedua. Pemerintah yang baru selalu mengadakan sarahan/sistem baru, yaitu Negara Thai patut ada Hukum Diktator sahaja walau berbeda Agama, harus membubarkan Hukum Islam yang berlaku di empat wilayah tersebut, pada tahun 2486 B. (Budha)./1944 M. Setelah pemerintah Coompul.Poe.Pi'Bulsongkram mengistiharkan tidak berlaku lagi Hukum Islam tersebut didalam Peradilan Agama Islam tingkat pertama diempat wilayah selatan, timbul masalah diwilayah tersebut khusus di wilayah Patani rakyat mengadakan demonstrasi menentang pemerintahan pusat, rakyat tidak mau ikut didalam memutuskan kasus berkenaan dengan keluarga dan warisan di Pengadilan Tinggi ataupun pengadilan umum.

Setelah terjadi perang sengit di wilayah Patani ada diantaranya kiai-kiai atau Ulama'-ulama' sepakat mencari jalan keluar dengan mengadakan musyarwarah diantaranya Imam-imam mesjid setiap desa untuk mencari solusi dan mempertahankan Hukum Islam yang telah di hapus oleh pemerintah pusat tersebut, dalam musyawarah untuk melantik pegawai-pegawai Majlis Agama Islam setiap wilayah di selatan dan seorang bijak pandai yang dinamakan *Datok Yuttitam* atau Qadhi Syar'i Daruri fungsinya untuk mengganti *Datok Yuttitam* sewaktu tidak ada ditempat.

Berkenaan dengan pegawai Majlis Agama Islam dan Datok Yuttitam, setiap wilayah dalam Pasal 36 mengatakan bahwa; dalam wilayah yang ada pegawai Majlis Agama Islam ada wewenang sebagai berikut :

Ayat 1 berbunyi :

Menasihatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubenur.

Ayat 2 berbunyi :

Bertanggung jawab melantik pegawai-pegawai mesjid “kepala 12” setiap mesjid dalam wilayah yang diserahkan oleh Departemen Agama dari pemerintah pusat.

Ayat 3 berbunyi :

Mengambil keputusan, masyarakat yang mengadakan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.

Ayat 4 berbunyi :

Mengadakan melantik pegawai mesjid dengan secara resmi.

Ayat 5 berbunyi :

Tolak unsur seandainya pegawai mesjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.

Ayat 6 berbunyi :

Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.

Ayat 7 berbunyi :

Mengambil keputusan dan mengadakan pindah Mesjid, bangun Mesjid yang baru, memperbaiki Mesjid yang rusak, sesuai dengan keadaan

desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat. Oleh demikian didalam pasal-pasal tersebut banyak lagi yang penulis tidak kemukakan diantaranya dalam masalah perkawinan, warisan, cerai, dan harta anak yatim dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut hampir sama dengan hukum Islam di pengadilan Agama Islam di Indonesia.²²

3. Peraturan Negara Thailand

Thailand mengubah peraturannya dari kerajaan absolut dan Thailand adalah demokrasi atau monarki Memiliki hukum tertinggi Apakah konstitusional Raja adalah kepala negara pada tanggal 24 Juni 1932. Tapi sepanjang waktu. Thailand juga merupakan demokrasi yang tidak mengikuti prinsip. Kudeta revolusioner merebut kekuasaan, membentuk sebuah koalisi pemerintahan dan mengatur peraturannya sendiri. Orang-orang tidak berhak atas kebebasan sebagaimana mestinya, jadi hal itu terjadi tiga kali lebih besar.

Pada tanggal 14 Oktober 1973, ada sebuah kelompok yang menyerukan demokrasi dan kediktatoran. Ini terdiri dari orang-orang, dari semua bidang karir di bawah kepemimpinan para siswa. Siswa dari semua institusi Ini adalah peristiwa yang tercatat dalam sejarah politik dan pemerintahan Thailand, sehingga generasi muda akan tahu. Menjadi cemburu dan mempertahankan rezim itu. Demokrasi harus dipertukarkan dengan kehidupan. Dan kesulitan sesama sebangsa.

²²

<http://sejarahpatani.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-islam.html>, sejarah patani, pada 10 October 2017

Acara kedua Terjadi pada tanggal 6 Oktober 1976. Ada mahasiswa dan masyarakat yang membela demokrasi. Melawan bagian belakang kelompok kekuasaan lama. Thailand telah kehilangan banyak sumber daya manusia yang berharga. Dan yang terakhir, pada tanggal 17 Mei 1992. ada sekelompok-kelompok yang anti Otoriter dan Demokratis. Hasil klaim ini. Memimpin amandemen Undang-Undang dasar Konstitubusi saat ini adalah Konstitusi Kerajaan Thailand BE 2540.

Institusi yang terkait dengan Negara adalah sebagai berikut.

1. Manajemen adalah Kabinet atau Pemerintah.
2. Departemen Hukum adalah parlemen yang terdiri dari dua anggota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dipilih oleh masyarakat dan senator Dipilih oleh Raja seperti yang diusulkan dari Perdana Menteri
3. Kehakiman adalah pengadilan yang bertanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai kasus sesuai dengan hukum. Untuk membuat Adil untuk orang-orang Dalam Konstitusi, ada ketentuan bagi pengadilan untuk menjadi lembaga independen parlemen dan pemerintahan. Komisi Yudisial (SEC) bertanggung jawab untuk mengatur penunjukan pejabat peradilan.

Pengadilan adalah institusi. Menjaga kepolosan sejati Kementerian baru telah diperbarui dan sistem administrasi Institut telah dibentuk dalam 3 bagian.

1. Pemerintah pusat adalah kementerian. Dan instansi pemerintah lainnya setara.

2. Daerah Terdiri dari 77 Provinsi (kecamatan, kecamatan, dan desa).
3. Lokal dibagi menjadi;
 - 3.1 kotamadya (kotamadya, kotamadya, kotamadya, kotamadya)
 - 3.2 Organisasi,
 - 3.3 Administrasi Propinsi, Dua bentuk pemerintahan lokal khusus: Bangkok dan Pattaya.
 - 3.4 Organisasi Administrasi *Tambon*²³

4. Gambaran Umum Masjid Al-Hidayah Al-Islamiah

4.1 Gambaran Biografi

Thailand mempunyai semua 77 Propinsi(Wilayah) seluruh bagiannya, Thailand banyak berbagai-bagai Agama berbagai aliran, menganut Agama Budhasebagai Agama yang mayoritas dan Agama lainnya sebagai Agama minoritas. Masyarakat yang menganut Agama Islam yang berada bagian bawah yaitu dibagian selatan kebanyakan yang menganut Agama Islam, yaitu di Wilayah Patani, Yala, Naratiwat, Setol, dan sebagian Senggora.

Patani adalah sebuah Wilayahyang terletak dibagian selatan Negara Thailand yang banyak masyarakat yang menganut Agama Islam, Patani mempunyai 12 daerah, termasuk daerah Yarang. Daerah Yarang mempunyai bebrapa mukim, satu-satu mukim mempunyai beberapa

²³ http://members.tripod.com/78_2/now2.htm 06:52, 15 Jan 18

kampung(*desa*) dan satu-satu kampung mempunyai beberapa masjid tergantung luas tempat dan juga tergantung keluarga.

Kampung Bendangdalam adalah sebuah kampung yang terletak *dimukim Sanor daerah Yarang*. Kampung ini mempunyai hanya dua masjid dan satu *musolla*, yaitu masjid *Al-Hidayah Al-Islamiah* yang menjadi penelitian dalam skripsi ini. Dan *masjid darussalam*. Masjid *Al-hidayah Al-islamiah* yang ada pengikut sekitar empat puluh kepala keluarga lebih kurang

4.2 Pendirian Masjid

Sebelum di jadi masjid, Kampung Bendan Dalam sudah ada surausebagai tempat *sollat*, *Surau* itu di perbuat dari kayu, tetapi sudah cukup besar pada waktu itu itu karena ahlikampung tidak terlalu banyak, setelah imam meninggal dunia maka di angkat Wannik Wanduyee sebagai imam masjid dan pengurus segala yang berkaitan dengan keagamaan di kampung *Bendangdalam*.

Pertama kali imam Wannik Wanduyee tukar dari surau akan menjadi masjid, dan juga pindah tempatnya, karena terlalu jauh pada rumah imamnya, pada tahun 1980 didirikan masjid dengan cara sederhana yaitu hanya dari kayu, di waktu itu masjid belum punya ada *mic* (pembesar suara) dan juga alat-alat eletronik untuk memanggil orang di waktu solat. Tetapi masjid *Al-hidayah Al-islamiah* hanya menggunakan geduk (dibikin dari belulang sapi), dan bikin *sutoh* (tempat tinggi) sebagai alat dan tempat untuk memanggil orang di waktu solat (azan).

Pada tahun 1989 M.bawah pimpinan imam Wannik Wanduyeedisepakati oleh ahli *kampung* sekitar 30keluargabesar yang ada di *kampung Bendangdalam* untuk membangun masjid *Al-Hidayah Al-Islamiah* dengan semen. Masjid *Al-Hidayah Al-Islamiah* adalah tempat solat dan juga sebagai pusat keagamaan. Masjid *Al-hidayah Al-islamiah* *kampung* terletak di *kampung Bendangdalam mukim Sanor daerah Yarang wilayah Patani*²⁴

Pada tahun 1990 M. masyarakat ahli *kampung* semakin hari semakin banyak maka di sepakati oleh ahli *kampung* untuk didirikan masjid dengan semin, dan dilantik Usman Wanduyee sebagai tukang dalam mendirikan masjid. Imam Wannik Wanduyee sebagai ketua dalam kegiatan dirikan masjid, dengan sanggupan oleh ahli *kampung Bendangdalam* untuk membangunkan masjid.

Masjid *Al-hidayah Al-islamiah* didirikan pada tanggal 14-10-1410 H, luas sekitar sembilan meter dan panjang sektar dua belas meter, di bangun masjid itu dengan tidak ada upahan yaitu dengan suadaya masyarakat, supaya masyarakat itu merasa miliki dan tanggung jawab, kebiasaan kegiatan dirian bangunan masjid itu di waktu malam, karena keluarga masyarakat *kampung* hanya disiang hari masuk kekebun, ladang, sawoh padi dan sebagainya.

²⁴ Wawancara prapenelitian Yusof muso, 08 september 2017, 20:05 di daerah yarang

5. Petugas Kepengurusan Masjid *Al-Hidayah Al-Islamiah*

Berdasarkan kuasa pemerintah dalam Masjid *Al-hidayah Al-islamiah* masih mempunyai struktur pengurus dan juga para *dewan-dewan* masjid(kamakan masjid):-

Imam Masjid Muhammad

Khotib Masjid Hasam

Bilal Masjid Zakariya

Dewan(Kamakan)Masjid

1. Yusuf
2. Cek Ahmad
3. Ibrahim
4. Haji Yusuf
5. Ahmad
6. Haji Ismail
7. Haji Aadurrosyid
8. Abdullah
9. Abdurrosyid
10. Abdurroman
11. Haji Ropi
12. Abdurrohman Wanduyee

Masjid *Al-hidayah Al-islamiah* dalam hal kepengurusan yaitu menggunakan sistem musyawarah dalam keputusan satu-satu program,

imam masjid sebagai ketua dalam bidang keagamaan dan juga juga dalam bidang kemasyarakatan tetapi kekuasaan tidak sepenah penahnya seperti dalam hal nikah, jika masyarakat tidak mau memilih imam ditempat bisa saja pilih-pilih di tempat lain.

Khotib adalah sebagai seorang pemimpin dalam masyarakat, khotib sebagai seorang memberi khutbah dihar jumat, khutboh yang disampaikan dihari jumat biasa meng deimbangkan supaya tidak barlahu kemungkaron dalam masyarakat yang memberi kutbah di waktu solat jumat sekaligus menjadi imam pemimpin solat, kebiasaan khutbah yang disampaikan seorang khotib pasti dengar semua orang

Bilal adalah seorang yang memanggil orang solat, bilal juga sebagai tugas bila sewaktu hendak dilaksanakan shalat/khutbah dialah (Bilal) yang menyampaikan kepada jama'ah dengan kata-kata yang khas. Pada hari Jum'at dapat disaksikan ketika imam akan naik mimbar maka Bilal akan memberikan aba-aba agar jama'ah tenang, mendengarkan khotbah secara sungguh-sungguh

Dewan masjid fungsi sebagai melihat dan menjaga aktivitas dalam masyarakat supaya tidak melakukan hal perkara yang mungkar dan juga hal yang tidak sesuai dalam masyarakat supaya menjagakan kesejah teraan, jika ada yang melakukan hal yang tidak sesuai maka pengurus masjid juga harus menangani dan juga bertanggung jawab penuh terhadapnya, kebiasaannya lebih mencendrung kepada hal-hal yang berkaitan keagamaan.

Masjid *Al-hidayah Al-islamiah* masih menggunakan sistem musyawarah dalam menunaikan tugas, membagikan kekuasaan dalam menunaikan tugas contoh seperti acara di bulan Romadhoh, ada kejadian kematian di atas warga masyarakat, imam sebagai ketua tanggung jawab penuh, khotib dan bilal dan *dewan-dewan* masjid sebagai hubungi dengan masyarakat lain dan sebagainya.²⁵

6. Gambaran Umum Sekolah Melayu/TADIKA

6.1 Asal Sekolah Melayu/ TADIK

Pada asal sekolah Melayu/TADIKA adalah di ibaratkan sebagai pusat pengajian Al-Quran dan Bahasa Melayu di rumah-rumah *Tuan Guru* yang mengajar Al-Quran waktu selepas sholat Maghrib, kemudian mengajar mata pelajaran Tajwid dan Bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Jawi (Arab-Melayu). Disebabkan pada satu masa dulu, kerajaan Siam memaksakan anak-anak Melayu Patani bersekolah dalam system persekolahan Siam (Sekolah Dasar Kebangsaan Thai), ia menggunakan bahasa Thai sebagai pengantar serta mengharamkan bercakap Malayu dalam sekolah Siam. Maka peluang untuk anak Melayu belajar agama dan Melayu sangat sedikit.

Berasas kesedaran, dan rasa tanggungjawab , bimbang kehilangan marwah bangsa sendiri, serta semangat cinta kepada Agama dan Bangsa sangat tinggi, maka lahirlah rasa ingin mengaja dari kalangan para keahlian di tempatan dan para alim ulama semasa, mereka mengajar

²⁵ Wawancara prapenelitian Ahmad, 08 september 2017, 20:05 di daerah yarang

mengaji Al-Quran di rumah mereka sendiri dan mengajar bacaan Melayu bertulisan Jawi sebagai tambahan belajar selepas sholat Isya hingga ke malam.

Mengikut haji ismail, pada masa itu pihak pegawai kerajaan mengcuriga belajar Melayu, baik di rumah maupun Surau, Balai Sah (Sholat) dan Masjid. Sekolah Melayu/TADIKA adalah sebagai sasaran dalam curigaan itu, hingga setengah orang Melayu tidak berani menyebut perkataan Melayu didepan khalayak ramai dan sekolah Melayu tidak boleh diadakan secara terbuka. Dengan itu mereka hanya mengajar Al-Quran dan pelajaran Tajwid sahaja, dan mereka mengajar bahasa Melayu di Taman Didikan Kanak-Kanak yang mereka sengaja tubuhkan sebagai tempat mengasuh anak-anak kecil, mereka singkatkan perkataan Taman Didikan Kanak-Kanak kepada Tadika sejajar dengan apa yang ada di Malaysia dan Indonesia. Perkataan sekolah Melayu digunakan pada sekitar tahun 1950-an (2493) hingga ke hari ini.

Pada awalnya di sekolah Melayu mereka hanya mengajar baca Al-Quran dan bacaan dan Tulisan Melayu dengan menggunakan huruf Jawi sebagai asas, Tulisan Rumi sebagai pengajian bahasa. Guru yang mengajar biasanya pandai dalam semua ilmu yang diajar, seperti Al-Quran, Tajwid, dan pandai dalam bahasa Melayu dengan dua tulisan. Guru itulah yang menjadi Imam Sholat (sembahyang) di kampung dan juga Imam Sholat di masjid, dan mengefalan, baca doa tahlilan, arwah, kesyukuran, dan lain-lain yang bersangkutan dengan kegiatan agama dan masyarakat. Mereka ini digelar dengan berbagai gelaran mengikut panggilan tempatan dan

kawasan masing-masing ada yang panggil *Tok* atau *Tuan* yaitu perangkat gelar lokalitas oleh masyarakat) “*Tok Guru*” , “*Babo*” , “*Tok Imam*”, “ *Tok Haji*” , “*Tok Leba*”, “*Tok Pakir*” , “*Cikgu*” dan sebagainya.

Pada tahun 1970-an , sekolah Melayu/TADIKa tersebar luas di kampung-kampung, mereka sediakan tempat khas untuk mengajar, seperti di rumah *Tuan Guru*, *Balai Sah* (Sholat) dan Masjid. Para pengajar pula terdiri dari lulusan Pondok dan sekolah-sekolah agama dan sebagian mereka yang lulusan dari Mekah.

Ada setengah tempat, sekolah Melayu itu dibesarkan menjadi Pondok dan sekolah agama. Ada juga masih kekal dengan Tadika hingga sekarang. Di setiap kampung orang Melayu bila ada masjid, maka sekolah Melayu/Tadika pun ada. Seorang Tokoh pendakwah ada berkata : “kampung yang tidak ada sekolah Melayu/TADIKa, kampung itu adalah dayus”

Sekolah Melayu/Tadika pendidikan agama Islam, dengan menggunakan bahasa Melayu bertulisan Jawi dan Rumi untuk anak-anak Melayu Patani yang berumur diantara 5-12 tahun, belajar hari Sabtu dan Ahad. Pada kebelakangan ini, bermula tahun 1977 (2520), oleh karena kebanyakan pengajar-pengajar sekolah Melayu/TADIKa, terdiri dari anak-anak lepasan sekolah agama dan sekolah pondok, maka mata pelajaran dan ilmu yang diajar mengikut apa yang di ambil dari tempat yang dia belajar. Tetapi pelajaran asas mereka kekalkan, antaranya adalah;

Al-Quran, Tauhid, Fikah, Akhlak, Sejarah (Sirah) dan Melayu (Jawi dan Rumi).

Selain itu juga mereka membentuk kelas-kelas dan membagi ruang kelas pengajian, ada juga yang member nama “ Darjah” , “Kelas” dan sebagainya. Mereka membagi darjah mengikut umur dan kepandaian pelajar. Darjah atau kelas, dimulakan dengan kelas “setengah” atau “kelas kosong” (yaitu sebelum kelas satu, kebelakangan ini ditukar kepada “ kelas A” dan “kelas B”), kemudian kelas satu, dua, tiga dan empat. Pelajar yang tamat kelas empat di sekolah Melayu/TADIKa mereka dapat sambung pengajian di sekolah-sekolah agama dan Pondok-Pondok.

Tahun 1997 (2540), mula menyatukan kurikulum pengajian sekolah Melayu/TADIKa, dengan menggunakan buku-buku pengajian sekolah Melayu/TADIKa yang dikeluarkan oleh Badan pelajaran Majelis Agama Islam Patani sebagai asas. Sebelum itu buku-buku pengajian sekolah Melayu/TADIKa sudah sedia berada, yang dibuat dan catatkan oleh PUSTAKA Patani dan tersibar luar di wilayah Patani sahaja. Dan setelah adanya kurikulum Sekolah Melayu/Tadika, maka wilayah-wilayah lain pun turut guna buku tersebut sebagai menyatukan buku pengajian sekolah Melayu/TADIKa dalam satu kesatuan. Berasaskan ingin menggunakan buku yang sama, mereka tubuhkan persatuan-peresatuan Tadika untuk tujuan mudah menyusun dan mentadbir.

Mata pelajaran yang di ajar di Sekolah Melayu/TADIKa adalah Pelajaran asas antaranya:-

1. Al-Quran
2. Tauhid
3. Fiqah
4. . Akhlak
5. Sejarah (Sirah)
6. Melayu (Jawi dan Rumi)

Pelajaran tambahan adalah

1. Tajwid
2. Tafsir
3. Hadis
4. Nahu
5. Saraf
6. Khat
7. Muhadasah
8. Dan lain-lain



Bermula pada tahun 2005 (2548), pengajian sekolah Melayu/TADIKa mulai berubah penyusunan pembagian kelas atau darjah dari ada empat kelas kepada enam kelas, mengikut penyesuaian dengan pengajian dasar kerajaan Thai. Maka kelas permulaan adalah kelas satu, dua, tiga, empat, lima dan enam, sama dengan system pengajian sekolah dasar kerajaan sebanyak 6 kelas.

Kebanyakan lulus sekolah Melayu/TADIKa, mereka sambung pengajian di sekolah atau Pondok yang gurunya belajar dulu dan sedikit

yang pergi ketempat lain. Ada yang belajar terus di Pondok dan ada juga yang pergi sambung pengajian mereka ke luar negeri seperti di Negara Arab (Timur Tengah), di Pakistan dan di Negara jiran seperti Malaysia, Indonesia, Brunei. Mereka inilah sebagai pengganti guru di sekolah agama dan pondok dan ada juga yang terus memikir dan berusaha membangunsekolah Melayu/TADIKA supaya tidak hilang ditelang zaman.

Setelah tadika mengajar secara masing-masing membuatkan kedudukan tadika mengalami berbagai kelemahan dan kekurangan, maka mereka pikir menyatukan sekolahb Melayu/TADIKA didalam kesatuan, dengan mendapat bimbingan dari sekolah-sekolah agama.²⁶

6.2 Pendirian Sekolah Melayu/TADIKA

Awalnya masyarakat merasa tanggung jawab terhadap masalah-masalah yang terjadi dan akan menjadi kepada keluarga dan masyarakat, Mengata wanyusof “Berdasarkan dalam firman Alloh Ta’ala : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: pejeganya malaikat-malaikat yang kasar, yang kasar yang tidak pernah menderhakai Alloh terhadap apa yang diperintahkan nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintah QS. Al-Tahrim:6 ” dan juga musyawarahlah oleh keluarga masyarakat dan para-pa pengurus untuk menjauhi segala yang mungkar dan juga menunaikan salah satu Fardhu ain maka dapatlah hasil musyawarah itu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak

²⁶Amanat Penderitaan Rakyat Patani (AMPERA PATANI), <http://amperapatani1992.blogspot.co.id/2016/02/sejarah-asal-usul-sekolah-melayu-di.html?m=0>, 07 NOVEMBER 2017, 6:08

yang berada di kampung *Bendang dalam* yang bertanggung jawab sebagai guru adalah orang-orang tua yang mampu akan memberi ilmu pendidikan kepada kanak-kanak yaitu orang tua yang berasal dari pondok santrin, dan juga di sepakanti awalnay sore hari sening hingga hari jumaat sebagai hari belajar sekolaha Melayu/TADIKa yang berada lokasinya di masjid Al-hidayah Al-islamiah.

Tetapi setelah mulai berjalan sekitar dua minggu maka muncul beberapa masalah salah satunya tentang waktu belajar selalu ada masalah baik dari pihak guru sendiri dan juga kanak-kanak, karena kebiasaan sehari-hari itu orang tua juga kerja dan juga bagi kanak-kanak ada pendidikan di sekolah umum nasional Thailand, kebiasaan orang tua kerja disiang hari semenjak jam 8 hingga jam 4 atau jam 5 sore, bagi kanak-kanak juga mulai belajar disekolah umum dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, dengan waktu juga tidak terlalu luas maka musyawarat lagi oleh warga masyarakat dan juga para-para yang bersangkutan itu maka pindah dari sore hari maka di jadi pagi dihari sabtu dan hari ahad hingga sampai siang hari.

Berkaitan lokasi yaitu di masjid karena anak- anak kampung tidak terlalu banya hanya sekitar dua kelas, Tahun 1984 maka nakan-anak kampung dan juga anak-anak luar mulai masuk membawa sehingga ruang untuk belajad dimasjid itu tidak cukup, maka terlu paksalah dengan kebijakan pengur dan juga para-para warga masyarakat untuk mencari ruang untuk mengajar kanak-kanak yaitu menggunakan serambi rumah-rumah warga yang berada disamping masjid, 1990 dengan kebijakan

penurus menggunakan dibawah rumah(rumah model dulu di buat dari kayu) muhammad wannik sebagai menjadi kelas untuk memberi pendidikan kepada kana-kanah.

Tahun 1996 Masyarakat musyawah untuk membungkan gedung sekolah sebagai tempat belajar, awalnya usaha masyarakat untuk mencari dana untuk mendirikan sekolah Melayu/TADIKKA “Mengatah haji yusu” pernah ada guru yang kenal dengan oran kaya Arab yaitu para bisnis besar, usaha unuk mendapatkan modal untuk membangunkan bangunan gedong sekolah setelah oang kaya arab melihat kawasan dan juga menanya tentang data penduduk dan juga biaya dalam membangunkan gedong sekolah, mengatakan orang kaya Arab kepada para pengurus dan juga warga masyarakat “Hanya bangunan satu gedung dengan warga masyarakat sebanyak ini tidak bisa bangun, bahkan hanya satu gedung ini saya bisa bangun hanya mengguna dana saya sendiri” makan dengan ngajuan untuk minta dana dari luar itu tidak jadi, maka dengan kata kalimat “hanya warga sebanyak ini tidak mampu untuk membangunkan gedung untuk kanak–kanak untuk menuntuk ilmu” membawa kepada masyarakat itu malu.

Tahun 1995 anak-anak sekolah tadi juga ramai sekita 100 orang kurang lebih, maka musyawarahlah oleh pengurus dan para warga masyarakat untuk membangunkan gedong sekolah sebagai tempat belajar maka tidak berapa lama buwat bangunnan dengan kayu disamping masjid yang dipimpin oleh al-marhum usman wanduyee, dengan menggunakan dana bantuan dari pungutan oleh warga masyarakat kampung Bendang Dalam sehingga selesai bangunan itu, maka dapat menjadi hanya 4 kelas.

Tahun 1997 dengan pendidikan sekolah Melayu/TADIKa sudah maju dan juga kampong di samping-samping Bendang Dalam belum mempunyai sekolah Melayu/TADIKa maka banyaklah anak-anak dari kampung luar itu masuk belajar *dikampung Bendangdalam* hingga sampai kurang lebih 300 orang maka dengan bangunan itu juga untuk anak-anak kampung maka terpaksa pengurus itu mencari ruang untuk belajar kepada anak-anak, maka menggunakan serambi rumah Abdurrahma, serambi rumah almarhum imam Abdulloh, serambi rumah iman Muhammad, sebagai tempat menuntut ilmu.

Tahun 2003 gara-gara anak sekolah itu ramai membawa kepada ruang untuk belajar itu tidak cukup maka para pengurus dan juga warga masyarakat fikir untuk membangunkan gedung.²⁷ Kebijakan pengurus masjid Dana awalnya pungutan setiap keluarga 2000 B. untuk membeli alat dan sebagainya. Dana dalam membangunkan masjid yaitu ahli kampung sebagai orang usaha dalam biaya dalam membangun masjid, dari awalnya pungutan 2000 B. Harus bagi setiap keluarga Kebanyakan keluarga masyarakat kerja dikampung-kampung, tanam padi menoreh getah (karet) dan sebagainya, dengan dana dari keluarga masyarakat sebab menjadi panjang waktunya dalam membangunkan masjid.²⁸

²⁷ Wawancara prapenelitian dengan Wanyusuf, 17 April 2017 di daerah yarang

²⁸ Wawancara prapenelitian Wanyusuf Wandyee, 22 August 2017, 10:43, di daerah yarang

Dana dalam pendirian masjid dan sekolah Melayu/TADIKHA hasilnya minta bantuan dari warga masyarakat yang bermaksud para pengurus berdiskusi dan juga bermusyawarah dengan warga masyarakat di hari jumat dengan berbagai cara;-

1. Hasil dari pungutan warga masyarakat

Dana dalam pendirian masjid hanya pungutan dari warga masyarakat yang mengikuti masjid *Al-hidayah Al-islamiyah*, tidak ada bantuan dari mana-mana pihak, puncanya menjadi panjang waktu dalam pendirian masjid itu. Kebanyakan warga masyarakat ahli kampung itu agar sulit untuk bantu dana dalam pendirian masjid itu kebanyakan ahli kampung hanya kerja di kampung-kampung yaitu kerja cocok tanam, buah buahan menoreh getah dan sebagainya, awalnya imam masjid hanya minta setiap keluarga itu hanya 5000 B (Sekitar 500 Rp).

2. Bentukkan kartu Juwal tanah (sodakoh jariyah)

Kartu Juwal tanah khorat untuk bangun masjid (sebagai sodakoh jariyah) di setujui oleh pengurus masjid bahwa tanah dalam 1 rai maka dibagi menjadi kecil kecil sekitar 50 senti. Maka dijuwal bagi yang beli itu akan menjadi miliknya dan itu sebagai sodakoh jariyah untuk bangun masjid dan juga sekolah Melayu/TADIKHA.

3. Bentuk celeng kepada setiap rumah dan juga warung-warung

Yaitu di setujui dalam musyawarat untuk mencari dana dengan menggunakan celeng dibagi setiap rumah dan juga warung di luar bagi yang

mampu menyibar diluar sepya cepat untuk menghasilkan dana untuk buat membeli alat dalam pndiriannya.

7. Kebijakan politik pemerintahan terhadap komunitas muslim patani

1. Kebijakan pemerintah mengguna sistem integrasi dalam pendidikan

- a. Berdasarkan undang-undang dasar tentang pendidikan Nasional tahun 2542 Bab 4 ayat 23 yang berbunyi “menajemen pendidikan baik pendidikan yang berada dalam sistem danjuga tidak ada dalam sistem, pendidikan harus difokuskan pada pentingnya pengtahuan, moral proses belajar dan menintegrasikan yang sesuai pada jenjang pendidikan” dan berdasarkan undang-undang pada ayat 24 yang berbunyi “menajen pembelajaran terpadu pengtahuan dalam berbagai-bagai aspekrasio seimbang supaya menumbuhkan kebijakan yang bernilai bagus dan atribut yang diinginkan”

Pentingnya pengajaran terpadu

Integratif ajaran islam ini mempromosikan dan mengembangkan berbagai kapasitas intelaktual dan mananggapi pola belajar dan perbedaan antara siswa sangat baik selain itu, ini juga mengembangkan serat estetika dan kerja bagus itu akn mempengaruhi perasaan dan ide dengan baik, selain itu, siswa akan dapat mengungkapkan ketertarikan maraka terhadap materi pelajaran dan dapat menerapkan pengetahuan mereka di lapangan.

Tujuan sistem integrasi

Tujuan kurikulum pendidikan islam terpadu adalah sebagai berikut:

1. Agar siswa bisa menyadari masing masing memiliki hubungan satu sama lain

2. Semuanya selalu sama dalam pengajaran pengajaran mereka memiliki dan hubungan dengan para siswa
3. Siswa akan termotivasi dalam belajar, para siswa mampu memecahkan masalah-masalah itu sendiri.
4. Untuk memecahnya dalam satu masalah siswa itu membutuhkan pengetahuan-pengetahuan dari berbagai bidan.
5. Siswa akan adarasa memiliki dan penerimaan orang lain

Inti sistem integrasi adalah mengintegrasikan dalam pengelolaan pembelajaran terpadu

1. Untuk seorang pelajar itu mampu mengatasi masalah-masalah sendiri.
2. Agar siswa memiliki tempat untuk belajar secara langsung agar munafaat dan bermakna.
3. Untuk memikirkannya bahwa semua pembelajaran itu saling terkait.
4. Untuk memnuh kepentingan masing-masing.
5. Untuk menambah semangat.
6. Fokus dalam belajar secara campur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 2542 pasal 4 ayat 23 “Menajemen pendidikan dalam sistem, pendidikan non formal, pendidikan harus difokuskan pada penting pengetahuan moral dari proses belajar dan sistem intergrasi supaya menyesuaikan dalam pendidikan. Dan dalam ayat 24 berbunyi “manajemen pembelajaran terpadu yaitu pengetahuan tentang berbagai aspek pengetahuan itu seimbang dan menanamkan kebijakan dengan nilai dan karakter yang bagus terhadap semua subjek.

- b. **Kebijakan pemerintah untuk mendapatkan uang honorarium kepada guru sekolah Melayu/Tadika untuk mengalokasikan uang subsidi ini adalah kompensasi guru dipusat pendidikan islam di masjid(sekolah melayu/tadika) dan biaya pengelolaan masjid dengan menyesuaikan subsidi terusasan sejajar dengan kondisi struktural gambar dan biaya hidup**

Dalam musyawarah untuk setujuan punya hak untuk mengajukan permohonan pendirian atau pemindahan sekolah swasta berdasarkan undang-undang dasar, sekolah swasta tahun 2550/ 2007 modifikasi yaitu untuk mematuhi pedoman dukungan negara supaya menjadi kesetaraan pendidikan, hal ini sesuai dengan kondisi tahun 2550/2007. Dalam Undang-undang dasar, pendidikan Nasional tahun 2542 yaitu piagam di sekolah swasta ini dan dalam kehidupannya.



BAB IV

RESPON PENGURUS MASJID TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH THAILAND

A. Analisa terhadap Kebijakan pemerintah dalam pendidikan

1. Sistem Integrasi dalam pendidikan di wilayah Thailand selatan tidak bisa memberikan maksud dengan jelas, mengikut undang-undang dasar tahun 2542 pasal 4 ayat 23 “Menajemen pendidikan dalam sistem, pendidikan non formal, pendidikan harus difokuskan pada penting pentahuan moral dari proses belajar dan sistem Intergrasi sepaya menyesuaikan dalam pendidikan dan dalam ayat 24 berbunyi manajemen pembelajaran terpadu yaitu pengetahuan tentang berbagai aspek pengetahuan itu seimbang dan menanamkan kebijakan dengan nilai dan karakter yang bagus terhadap semua sabjek.

Sebenarnya sistem integrasi itu cukup baik dalam pendidikan di sekolah umum, bertujuan cepat dalam menambahkan ilmu dan pengalaman kepada murednya, tetapi kurang baik dalam sekolah melayu/tadika itu menggunakan sistem integrasi karena kondisi sekolah Melayu/TADIKA itu mengasi ilmu tentang keagamaan, dan ilmu Agama itu tidak cukup dengan tukar pendapat atau diskusi, dari murednya justru untuk mendapatkan ilmu Agama itu harus melalui belajar dengan cara berguru, menggunakan dalam pendidikan dengan berbahasa jawi tulisan arab dan bahasa rumi, dan juga sekolah Melayu/TADIKA, mengajar lebih mencenderung keagamaan, seperti berkaitan ilmu mengenalkan tuhan, kenalkan cara beribadah, kenakan akhlak dan moral yang baik dalam islam

yang dicontoh oleh nabi dan rasulnya. Sekolah Melayu/TADIKHA mengajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia dan juga akhirat justru lebih kepada akhirat. Sekolah Melayu/ TADIKHA juga bukan hanya mengajar tentang teori tetapi sekolah Melayu/ TADIKHA lebih mengambil secara praktek dan mengajar kehidupan berbudaya Melayu.

Masyarakat di Patani Thailand selatan beragama Islam, kebijakan pemerintah menggunakan sistem integrasi, akan menjadi faktor masalah dalam pendidikan, membawa sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di karena isi ilmu kepada murid itu dengan cara bercampuraduk disitulah mulai keluar ide-ide dari masyarakat dan pengurus untuk mempertahankan jati diri orang Melayu beragama Islam, justru sistem integrasi itu menjadi faktor dalam sekolah Melayu/ TADIKHA, karena membawa kepada kanak-kanak itu tidak bisa mengenal diri dengan sebenar, tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan dengan secara Islam sehingga membawa kepada tidak sejahtera dalam masyarakat, itulah kurang baik di gunakan sistem integrasi di sekolah Melayu/ TADIKHA

Pada hakikat sebenar itu pendidikan sekolah Melayu/TADIKHA timbul dari pada suadaya masyarakat dan juga menggunakan berbagai sistem dan juga berbagai kurikulum mengikut kondisi dan situasi, untuk mewarnakan dalam pendidikan dan juga mempertahankan jati diri, yang mengeluarkan buku-buku adalah para kiyai-kiyai karena para kiyai adalah orang yang paling mengetahui kondisi anak pribumi, mempertahankan sekolah agama itu supaya kanak-kanak terlepas dari pada fardhu dan juga mencari keredhaan Allah.

Dalam musyawarah untuk setujuan punya hak untuk mengajukan permohonan pendirian atau pemindahan sekolah swasta berdasarkan undang-undang dasar, sekolah swasta tahun 2550/ 2007 modifikasi yaitu untuk mematuhi pedoman dukungan negara supaya menjadi kesetaraan pendidikan, hal ini sesuai dengan kondisi tahun 2550/2007. Dalam Undang-undang dasar, pendidikan Nasional tahun 2542 yaitu piagam di sekolah swasta ini dan dalam kehidupannya.

2. Uang honorarium adalah uang bantuan dari pemerintah untuk diberi kepada Guru di sekolah dan juga para pengurus-pengurus masjid, yaitu uang sebanyak sekitar 2000 B. atau 700,000 rp. tergantung statusnya imam, khotib, bilal, seluruh pengurus masjid dan guru yang mengajar di sekolah Melayu/TADIK. Mengata Ustaz Syukri, uang honorarium ini bisa dikatakan uang gaji bagi petugas setiap bulan.²⁹

program uang honorarium ini diistilahkan sebagai obat apa bila uang itu bisa di mengelola dengan baik dan uang honorarium ini juga bisa menjadi rucun dalam masyarakat apa bila tidak bisa menguntrl dengan baik, bisa memecah belah dalam masyarakat dan bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat. Sekiranyapemimpin itu tidak bisa mengontrulkan bisa manimbulkan konflik bila pemimpin itu tidak menyesuaikan secara baik. Karena Masyarakat Patani juga ilmu itu sangat kurang ilmudan juga sumberdaya manusia juga masih kelas bawah. Saat sekarang banyak terjadi konflik dalam Masyarakatyakat Patani berkaitan

²⁹ Wawancara prapenelitian syukri, 09 September 2017, di daerah muang

dengan uang, banyak berpecah belah kalangan guru mengajar, pengurus dengan pengurus imam dengan guru dan sebagainya bannyak berlaku pecah belah dalam kalangan para pengurus masjid. Uang disitilah kata hambur sebutir beras didepan ayam yang banyak,pasti akan menimbul rebutan untuk mengisi perut.

Pada asalnya Sekolah Melayu/ TADIKA dan pengurus masjid ini pekerja dengan tidak ada gaji, yaitu kebiasaan dari dulu masyarakat Patani menunaikan tugas dengan jiwa pengerbanan danjuga jiwa keikhlasan baik pengurus masjid dan guru Sekolah Melayu/ TADIKA sebelum ada program uang honorarium yaitu para pengurus, guru akan menjadi terpisah masyarakat, masyarakat itu tidak merasa tanggung jawab terhadap masjid dan Sekolah Melayu/TADIKA setelah mengadakan program-program seperti itu akan membawa kepada masyarakat itu terasa asing dan terasa tidak ada tanggung jawab.

B. Respon pengurus masjid Al-hidayah Al-islamiah terhadap pendirian Sekolah Melayu/TADIKA

1. Respon pengurus masjid terhadap sistem integrasi dalam pendidikan Agama, Sekolah Melayu/TADIKA

Pada hakikat sebenar itu pendidikan Agama, Sekolah Melayu/ TADIKA timbul dari hasil suadara masyarakat, masyarakat adalah orangmembangunkan sekolah masyarakat yang membinakan sekolah masyarakat yang merasakan tanggung jawa bersama, dan juga menggunakan berbagai sistem berbagai kurikulumuntuk menyesuaikan

kondisi dan situasi, untuk memperoleh pendidikan, mewarnakan dalam pendidikan keagamaan untuk mempertahankan jati diri orang Melayu, dan para kiyai adalah orang yang mengeluarkan buku-buku karena para kiyai adalah orang yang paling mengetahui kondisi anak pribumi, mempertahankan sekolah Melayu/TADIKa supaya kanak-kanak melepaskan dari fardhu ain karena islam itu harus belajar ilmu Agama sebagai fungsi dalam diri dan supaya hidup mencari keredhoan Alloh.

Sebenarnya dalam islam, menuntut ilmu itu adalah fardhu bagi setiap orang muslim, karena orang jahil itu adalah seteru tuhan. Apa bila kondisi umat islam menjadi minoritas maka semua tentang amal ibadah dan aktivitas itu pasti akan tidak normal selalu ada gangguan virus lainnya. Maka Mengata Ustaz syukri hidup orang muslim akan mencari keredhoan Tuhan, bahkan Negara Thailand menyuruh rakyat mencintai Negara, mencintai raja, kalau kita liat darisitu sudah berbeda tujuan hidup orang islam dengan orang budha, makapara pengtauuan tentang islam, pemimpin islam pengurus masjid mulai berfikir bagai mana cara untuk bisa menunaikan fardhu dan aktivitas. Sebenarnya pada Sekolah Melayu/TADIKa diPatani, itu bukan hanya berkembang ilmu Agama, justru untuk mempertahankan ilmu Agama, mempertahankan Budaya Melayu yang berada di Patani, mempertahankan bahasa Melayu supaya tidak hilang.³⁰

³⁰ Wawan cara prapenelitian syukri 09 September 2017 di Daerah Muang

Secara praktik yaitu menggunakan dengan mengajar secara mengikut tingkatan/kelass bermaksud guru adalah orang menyampaikan materi dan murid adalah orang menerima, materi adalah menyesuaikan mengikut tingkatan kelas. Mengajar secara praktik yaitu menggunakan dengan melalui hafalan dan juga praktik seperti mengajar fiqih, solat berwudhu, puasa, akhlak dalam islam dan sebagainya.

2. Ekualiti dalam penerimaan uang honorarium seluruh guru

Dalam hal memenajemenkan uang honorarium itu yaitu pengurus masjid adalah orang yang penanggungjawab dan pengurus masjid adalah orang yang memenajemenkan uang itu karena batuan dari pemerintah itu juga tidak mencukupi untuk mengasikan kepada guranya. Dari hasil uang honorarium itu pengurus masjid mengolah lagi sepaya untuk mendapatkan hasil yang sama dan juga tidak menjadi berpihak.

Uang hononarium itu adalah bantuan dari pemeritah kepada gura sekolah Melayu/TADIKa, uang itu bisa dikatakan uang untuk menggajikan guru. Uang itu bukan selalu ada setiap bulan terkadang uang itu tidak keluar, maka pengurus masjid harus mencarikan bantuan dari lain karena program ini sudah menjadi budaya dan program ini juga tidak bisa menghilangkan dan program ini bisa mengatakan dana untuk fasilitas kepada gura untuk memotivasi dalam memberi pendidkan kepada kanak-kanak.

2.1 Mempertahankan rasa kepedulian masyarakat terhadap sekolah Melayu/TADIKa dengan kebijakan-kebijakan itu akan menjadi jauh diantara

masyarakat dengan sekolah Melayu/TADIKA. Sedangkan untuk masyarakat merasa memiliki dan merasa tanggung jawab terhadap sekolah Melayu/TADIKA. Masyarakat merasa pentingnya sekolah Melayu/TADIKAitu, bagi masyarakat Patani sekolah Malayu/TADIKA itu adalah sebagai pusat atau tempat untuk menanamkan benih yang baik, memberi pendidikan kepada kanak-kanak dan sebagai tempat untuk melatih kanak-kanak berkaitan dengan amalan dalam Islam, justru sekolah Melayu/TADIKA itu akan membawa kepada masyarakat itu bisa menyatukan dan menyenangkan dalam hidup dengan masyarakat merasa sangat penting terhadap masjid dan sekolah Melayu/TADIKA maka mengadakan kegiatan sebagai dan konsep sebagai berikut:

a. Kegiatan buka puasa di bulan Romadhon

Bulan Romadhon salah satu bulan yang sangat penting bagi umat Islam, karena Romaddhon adalah bulan yang mulia, Romadhon adalah bulan yang penuh dengan Rohmat dan keberkatan, romadhon adalah bulan yang menggalak bersodaqoh dan bulan Romadhon adalah bulan yang pintu syurga di buka, maka pengurus menggunakan kebijakan untuk menggemarkan masyarakat kampung *Bendangdalam* untuk melaksanakan ibadah, membanyakan sodakoh, dan banyakan amalan-amalan lainnya. Denganmengadakan kegiatan buka puasa bersama ini mengupayakan amalan yang baik.

Pengurus masjid menggunakan kegiatan ini bisa luaskan jaringan persaudaraan dari luar baik ada pihak pengurus dan pihak

pemerintahKebijakan pengurus masjid dengan mengadakan kegiatan ini justru menghin dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat baik yang berada seperti konflik di antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok. Dan dengan mengadakan kegiatan ini dengan menggunakan ide mendekati, dalam hal ini dengan aktivitas awalnya sering berkumpul dengan memberikan bersama dalam masalah-masalah yang terjadi dan juga bisa menganalisa dari sekarang supaya memberi paham, menanam paham yang lebih baik kepada generasi penerus menimbulkan keharmonisan dalam masyarakat

pengurus masjid mengadakan program buka puasa bersama selama satu bulan di masjid dengan menggunakan dana yaitu hasil daripada sodaqoh.Program buka puasa bersama itu akan menjadi tanggungjawab bersama. Program itu adalah kewajiban hak semua masyarakat baik dari pada kaum ibu, bapa dan juga kanak-kanak. Dengan mengadakan program buka puasa bersama akan bisa membawa masyarakat menjalankankewajiban, mempertahankan budaya Melayu, mempeduli terhadap kegiatan masjid baik dalam hal ibadah, tanggung jawab dan pendidikan kanak-kanak. Program buka puasa bersama akan membawa masyarakat kampung *Bendangdalam* bisa menimbulkan tali persaudaraan yang lebih kokoh dan lebih mempertahankan budaya dan pendidikan kanak-kanak. Dengan hal pembukaan puasa bersadi masjid dengan menggunakan dana hasilnya dari sodaqoh jariah.

b. Kegiatan di hari Asyura

Hari Asyura adalah salah satu hari besar dalam islam, dan juga satu kegiatan budaya masyarakat Melayu muslim Patani mengadakan untuk menyatukan ummat masyarakat di kampung Bendangdalam, kebiasaan budaya orang Melayu Patani itu setiap kali ada kegiatan pasti akan ada jamu makan, karena kegiatan Asyura itu tidak bisa mengadakan dengan individu, bahkan menjadi kegiatan umum dengan cara seluruh yaitu kegiatan di masjid, maka pengurus masjid sering mengadakan dimasjid supaya menimbulkan perasaangemar dalam beribadah, menjalinkan tali persaudaraan mempertahankan budaya Melayu dan menggemarkan kanak-kanak dalam pendidikan, belajar baik teoritis maupun secara praktis. Supaya bisa mempertahankan jati diri orang Melayu dan mempertahankan Budaya. Dalam kegiatan hari asyura pengurus masjid kebiasaan mengundang warga masyarakat setempat jiran dan juga pihak pemerintah supaya dalam kegiatan seperti ini akan memberi paham bersama dan tidak saling mengcurigai.

c. Kegiatan perayaan pentas seni

Kegiatan pentas seni adalah kegiatan yang besar bagi kanak-kanak di wilayah Thailand selatan, kegiatan pentas seni kebiasaan berlumbadi antara sekolah Melayu/TADIK, Biasa kegiatan ini mengadakan setingkat sekolah setingkat daerah dan setingkat wilayah, untuk perayaan kanak-kanak supaya menggemarkannya.

Kampung Bendangdalam biasanya mengadakan kegiatan pentas seni setingkat sekolah di hari raya idil adha bertujuan menggemarkan kanak-kanak dalam pendidikan dan juga bisa mengingatkan Budaya Melayu. Sebab

mengadakan kegiatan pentas seni di hari raya idil adha itu sebab di hari itu warga masyarakat itu berkumpul mengupayakan menyatukan masyarakat, baik yang kerja di kampung-kampung dan diluar kota, bisa ada waktu menghiburan dan mengingat Budaya dan mencari minat bakat kepada kanak-kanak, supaya mencetuskan minat dan bakat, kemampuan kanak-kanak. Dan bisa melihat kebersamaan dalam Masyarakat kampung Bendangdalam.

Kegiatan pentas seni setingkat daerah dan setingkat wilayah mengadakan untuk mempertahankan Budaya Melayu supaya tidak hilang di bumi Patani, terkadang kegiatan ini kerja sama dengan pemerintah supaya tidak menjadi asing dan memberi pemahaman bersama dan pihak pemerintah akan merasa milik juga kegiatan ini dengan memberikan bantuan, dana dalam kegiatan. Karena tidak menjadi buruk sangka pihak pemerintah sendiri. Kegiatan lomba itu sangat memberi keuntungan dan munafaat kepada semua pihak, merasa memiliki kegiatan bersama

d. Kegiatan syarikat mati

Kebijakan pengurus Masjid *Al-hidayah Al-islamiah* mengeluarkan ide-ide untuk mengadakan uang syarikat mati, bertujuan membantukan masyarakat yaitu uang untuk bantuan dalam proses kematian. Peserta yang berhak menjadi anggota itu adalah masyarakat yang naungi di bawah masjid *Al-hidayah Al-islamiah*.

Pengurus masjid adalah orang yang bertanggung jawab dalam hal pungutan, mengumpulkan uang dari anggota yaitu setiap orang pasti bayar sebesar 10 B. atau sekitar 3,000 Rp. Perorang. Berarti yang berhak untuk

mendapatkan uang bantuan proses kematian itu, adalah anggota syarikatnya. Berhak dapat sebesar 3,000 b. Atau 1,000,000 Rp. Pengurus masjid *Al-hidayah Al-islamiah* telah menjalani sekitar limatahun lebihkurang.

Kebijakan pengurus masjid dalam menguruskan uang bantuan proses kematian, akan mengurangi beban kepada keluarga masyarakat, dengan kebijakan itu juga membawa kepada msyarakat lebih merasa hak tanggung jawab bersama dalam kehidupan.

e. Jamuan siang hari kepada guru mengajar

Kebijakan pengurus masjid menggunakan kibijakan jamu makan kepada gura yaitu bagi setiap keluarga yang berada dibawah naungan masjid *Al-hidayah Al-islamiah* pasti membuat makanan dua kali dalam satu tahun, bertujuan supaya masyarakat juga merasa tanggung jawab terhadap sekolah Melayu/TADIK, guru juga bisa ada kesempatan untuk curahat kepada keluar masyarakat Dengan program jamu makan kepada guru lah akan menimbulkan jalinan tali pesaudaran, akan merasa menimbulkan rasa cinta karena pada asalnya sekolah Melayu/TADIK itu dengan suadaya masyarakat.

f. Kurikulum Di Sekolah Melayu/TADIK

Kurikulum adalah program, sistem, rancana mengenai isi dan bahan untuk belajar yang akan menjadi pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum berfungsi supaya cepat menyesuaikan diri dari pada perubahan, mempermudah dalam menyampaikan ilmu, kurikulum berfungsi sebagai diferensiansi adalah alat yang memberikan pendidikan yang mampu meng

hasilkan pribadi-pribadi yang ulat, yang dapat dibutuhkan dan berinteraksi dengan masyarakat.

Mengata ustaz syuksi sekolah Melayu/TADIKAI itu pada awalnya bangun itu dengan suadaya masyarakat dengan menggunakan berbagai warna pendidikan, berbagai korikulum, berbagai sistem, bergai bagai waktu Sekolah Melayu/TADIKAI-*Hidayah Al-islamiah*, awalnya menggunakan sistem pendidikan klassic yaitu mured mendengar dan guru adalah menyampaikan karena kebanyakan pada awal itu juga guru dari pondok-pondok, kebiasaan pendidikan dari pondok itu sebuah buka dan juga sebatang pena sebagai alat dalam belajar.

g. Konsep membangun masyrakat yang harmonisan

Syarat untuk menjadi satu-satunya negara pasti ada mempunyai wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan dan lain sebagainya, dalam satu wilayah itu mempunyai berbagai jenis mahklok tuhan, baik ada dari alam semesta, manusia, hewan dan lain sebagainya, didalam satu wilayah itu akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan berbagai masalah tidak bisa kita menhindari dari masalah, di sini saya aku memberi ide sepayah dalam hidup itu bisa menahan uji dan menyelesaikan terhadap masalah dengan baik, mengupayakankeharmonisan mengikut dibawah ini;

1. Mengembangkan partisipasi masyarakat

Partispasi dalam ide ini kita menghidupkan dan mermpertahankan dari pada perkarayang mungkar sehingga membawa masyarakat itu akan pecah belah, dalam memperhatikan, mendorong masyarakat untuh mendapatkan

masyarakat yang adil dan mamur. Ide membangunkan masyarakat Patani yang aman dan damai dengan melalui hubungan partisipasi diantara individu dengan individu hidup dalam masyarakat dengan menggunakan ide partisipasi untuk mendekati, supaya menjalin tali persaudaraan dan juga menghindari dari salah paham karena putuh.

Untuk menyelesaikan dan mengangkat taras/martabat suatu kelompok supaya mensejah teraan karena dalam masyarakat itu tidak bisa kita milih untuk memberikan barisan itu sama dengan menggadingkan bahu, itu harus butuhkan waktu untuk memperjuangkan demi mensejahteraan dan membangunkan masyarakat yang lebih maju dan kokoh mudah-mudahan akan mejidi sebuah Negara yang amir dan mamur.

2. Mendekati masyarakat dalam pembangunan.

Proses bekerja sama dengan masyarakat bertujuan membangun masyarakat yang sejahtera, akan memperhitungkan dari masalah-masalah yang telah lalu sebagai pengajaran kedua pihak, dengan melalui tanam paham-paham bersama dan menanam sifat optimis.

Mendekati sebagai peran penting bagi pemerintah dan pemimpin terhadap permintaan rakyat dengan kita benar-benar menggali apa masalahnya, apa kebutuhannya, Apa yang dibutuhkan untuk segera memperbaikinya. Apa masalahnya Kedua, hal-hal ini perlu diperhitungkan. Memecahkan masalah bukanlah solusi untuk memecahkan masalah.

Masalah dan kebutuhan di dalam masyarakat itu sangat banyak, apa lagi dalam masyarakat awam, maka pihak pemerintah seharusnya lebih peduli

lebih medekati sepaya akan tidak timbul salah pahaman, tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dengan menanam sifat peduli yaitu melalui pendekatan dan sifat optimis akan menimbulkan kesejahteraan dalam masyarakat dan Negara.

3. Operasi harus berjalan dengan secara ansuransur.

Operasi untuk merubahkearah lebih baik pasti dengan menggunakan dengan secara ansuransur dan tujuan pengembangan masyarakat adalah melakukan aktivitas dan kebijakan-kebijakan dalam membinakan masyarakat yang lebih maju harus kedua pihak itu usaha, dengan cara sesama bertimbangan untuk menyesuaikan, maka pelaksanaanKegiatan tidak boleh dilewati sampai orang tidak tahu apa kegiatan Ini tidak akan menghasilkan hasil yang nyata.

4. Cipta lapangan kerja menampung kurang

Manusia itu tidak bisa hidup tanpa makan, manusia itu hidup penuh dengan kekurangan, maka manusia itu butuh kepada pihak kekuasaan dalam hidup, pemerintah danpemimpin itu itu harus melindungi rakyat, memnuhi kukurangan masyarakat masalah-masalah yang menimbulkan konflik itu bisa jadi penyebabnya kemiskinan, bisa jadi konflik itu dari pada tekanan, timbul konflik itu dengan sebab salah pahaman.

Kejadian konflik dalam masyarakat itu karena dalam kehidupan dengan kemiskinan, maka pemerintah harus mangatasi masalah itu dengan kekuasaan dan wewenang bangun lapangan kerja kepada masyarakat contoh memberi pendidikan tehnic, membuka pasar sebagai lapangan untuk bisnis, memberi

biaya dengan cara penjaminan atau sebagainya. Dengan menciptakan lapangan kerja kepada warga masyarakat mengupayakan kedamaian dan keharmonisan.



BAB V

PENUTUP

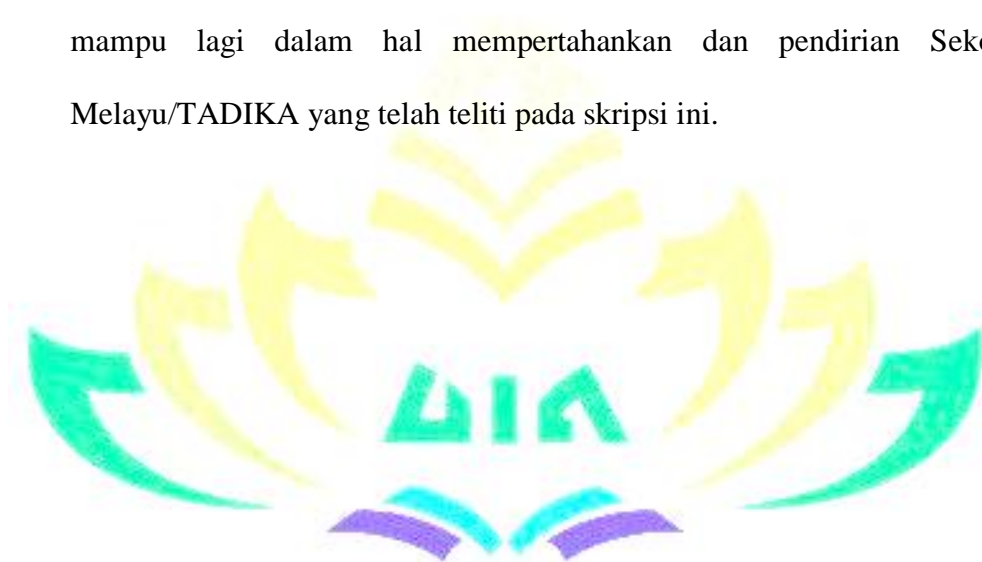
A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai masalah Setelah peneliti melakukan penelitian dan pembahasan meluui dari bab pendahuluan sampai analisis data, selanjutn peneliti dapat mengajukan beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas berikut:

1. Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan terhadap komunitas muslim yaitu Sistem *Integrasi* dalam membangun kapasitas intelektual dan menanggapi pola belajar serta perbedaan antara siswa. Pendidikan bertujuan agar mahasiswa bisa menyadari masing-masing bisa memiliki hubungan diantara satu sama lain, semuanya selalu sama dalam pengajaran mereka memiliki dan hubungan dengan para siswa, dan *uang honorarium* adalah uang dukungan dari pemerintah kepada guru di sekolah swasta dan sebaliknya uang ini juga bisa memisahkan diantara sekolah dengan masyarakat yang pada aslinya sebelum ada uang honorarium yaitu tabungan dari masyarakat untuk bantuan
2. Respon pengurus masjid *Al-hidayah Al-islamiyah* terhadap kebijakan pemerintah yaitu melalui kegiatan buka puasa bersama, hari Asyura, Syarikat mati, jamuan makan kepada guru, menambah mata pelajaran, dan mengeluarkan konsep membangun masyarakat yang harmonis.

B. Saran

1. Setelah kita dapati respon pengurus masjid dalam mempertahankan dan pendirian Sekolah Melayu/TADIKHA maka banyak mengandung kekurangan bahkan masih banyak yang belum terungkap.
2. Semuga para peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan lebih baik terhadap kajian ini lebih-lebih lagi terkait dengan dalam mempertahankan dan mendirikan Sekolah Melayu/TADIKHA. Peneliti terharap peneliti selanjutnya dan terutama peneliti sendiri agar lebih mampu lagi dalam hal mempertahankan dan pendirian Sekolah Melayu/TADIKHA yang telah teliti pada skripsi ini.



Pedoman wawancara

Nama : USTAZ SYUKRI

Kedudukan ;skertaris perkasa

Topik ; penyebab muncu tadi

Pertanyaan:

1. Apa penyebab muncul Sekolah Melayu/TADIK A?
2. Apa latar belakang dari sekolah Melayu kepada sekolahTADIK A?
3. Bagai manakah kurikulum pada awal kali berlaku di sekolah
4. Sebelum ada uang honorarium, pengurus masjid menggunakan kebijakan apa untuk menjadi vastas seorang gura
5. Bagai mana paanangan pemerintahan Thailand terhadap sekolah Melayu/TADIK A
6. BagaiAsalal usul diri masjid*Al-hidayahAal-islamiah*
7. Bagai mana kebijakan pengurus masjid dalam pendirian masjid dimasyarakat bendangdalam dan bagaiman dalam mengontrulkan dana ?
8. Bagaimana kesepakatan dan pendirian tempat untuk pendidikan kanak-kanak masyarakat kampung pendangdalam?
9. Bagamana kebijakan pengurus masjid untuk menambah semangat skepada seorang guru?

Jawaban:

1. Polittik pemerintah Thailand menjadi tekanan terhadap masyarakat Melayu sehingga masyarakat Melayu diwaktu itu sehingga tidak berani untuk mempergrakdalam tidak politik sehingga masyarakat Melayu itu tidak berani dalam bidang sekolah agama, karena umat islam menjadi fardhu atas seorang itu menuntut ilmu, apa bila masyarakat menganggap wajib dalam mununtuk ilmu maka lahilahdaripad guru mengajar al-qurandirumah-rumah warga, maka setelah mengajar quran itu maka mulailah belajar dengan cara tulus-tulusan itu lah awalnya lahir sekolah agama, maka sekolah Melayu/TADIKAdihari ini malai dari balajarlqurandirumah-rumah, dan dalam kampung juga bukan semua yang bisa mengajar, itu lah lahir sekolah arab pada tahun 1949, dengan melambangkan menggunakan sokok(peci) itu menunjuk kata orang Melayu.
2. Apa sudah politik pemerintah thaland menjadi tekanan terhadap masyakatmelayu dan juga sekolah agama diwaktu itu juga pandang pemerintah tidak jadi positif dan pemerintah juga sangat mencurigai dengan kalamatmelayu, pemerintah sangat cmburu dengan kalimat melayu, pihak orang melayu dan para pendikiawan mulai berfikif “ untuk mengajae dengan hal yang sama” maka dari situ lah tukar dari kalimat sekolah melayu akan menjadi sekolah tadika itulah menjadi masalah tekanan pemerintah terhadap sekolah melayu oleh sebab itulah orang yang tukar dari sekolah melayu kepada sekolah tadika ialah Allohyarham

Ahmad Saifuddin, setelah pada itu tidak membawa kepada pihak pemerintah itu tidak salah sangka

3. Kurikulum; setelah tukar dari sekolah melayu menjadi sekolah tadika, setelah lahirkan sekolah tadika di seluruh bumi patani yaitu dengan menggunakan berbagai warna berbagai bagai cara dan berbagai kurikulum dan berbagai ilmu/buku untuk mewarnai di sekolah tadikadibumipatani, baik yang ada pengalaman dari malayia, indonesia, dan tanah arab, itu lah dibumipatani timbul sekolah dengan tidak ada kesatuan dalam pendidikan setelah tadikabangun di bumi patani maka para pendikriawan membangun kan persatuan untuk menyatukan kurikulum
4. Pengurus masjid mengurs masjid menggunakan kebijakan pengurus masjid, dengan mengadakan fasilitas, dana dan juga makan siang di rumahwagraga, pengurus masjid terpaksa sistem pungutan biaya kepada pelajar mengikut keluarga. Bigi pelajar setempat pungutan biaya perorang itu sebesar 10 B. Sekitar 3,000 rp. Dan bagi pelajar yang diluar tempat pungtan biaya sebesar 20 b. Sekitar 6,000 rp. Uang dari hasil pungutan dari pelajar itu adalah untuk gaji guru.

Pengurus masjid memaksakan seluroh warga masyarakat itu siapin makan siang hari, dengan cara saling berganti jadwal masak di waktu siang hari dan juga bisa menggunakan kebijakan itu supaya warga masyarakat mearasa tanggung jawab bersama terhadapnya

5. Kami perwakilan para pengurus TADIKA bersama pihak pemerintah Thailand yaitu militer musyawarah berkaitan pahaman sekolah. Yaitu pahaman kata sekolah TADIKA mengajar siswa untuk prilaku tidak baik, sekolah TADIKA mengajar dengan cara tidak benar, mengatakan ustazsyukre, dihari ini pasi kita akan menyelesaikan. Berkaitan dengan TADIKA, sekiranya pihak pemerintahan Thailand paham bahwa pendidikan sekolah TADIKAsperti itu maka tidak akan menyelesaikan konflik dihari ini dan sekira pihak pemerintah memandan sekolah TADIKAsperti itu maka tidak akan menyelesaikan konflik yang ada di selatan
6. Masjid *Al -hidayah Al-islamiah* berdiri pada tahun 1410 h. Asal usul masjid Al-hidayah dibikin dari kayu, masjid kayu itu tidak bisa pasti bangunnya itu pada tahun brapa, masjid itu adalah masjid yang paling utama di kampung *bendangdalam*, selain pada masjid iu adalah musolla masjid diwaktu itu belum ada mik untuk memanggilkan orang solat, hanya ada gedukdan panggung yang tinggi. Dengan menggunakan dana hanya dari keluarga masyarakat kampung *bendangdalam*, untuk tempat lokasi terletaknya pihak dari tempat yang asal

Pedoman wawancara

Nama : wanyusufmusa

Kedudukan ; dewan masjid

Topik ; pendirian masjid

1. Bagaimana kebijakan pengurus masjid dalam pendirian masjid dimasyarakat *bendangdalam* dan bagaimana dalam mengontrol dana ?

Jawab : asal usul masjid *Bendangdalam* itu dibikin dengan kayu, masjid *bendangdalam* itu sudah ada, di *kampung bendangdalam* itu hanya satu masjid dan dua musolla. Hanya dengan mengunageduk atau sutoh sebagai tempat azan. Setelah beberapa tahun di sepakati imam masjid dengan warga masyarakat itu untuk setuju pindah lokasi untuk bangun masjid dengan semin, keputusan untuk membangun masjid dengan semin itu dengan memulai dirikan tahun 1410 h. Masjid itu hanya dibangun dengan hasil menggunakan tenaga masyarakat sebagai orang kerja tidak ada upah. Masyarakat kebiasaan pekerjaan di *kampung* hanya untuk waktu bangun masjid itu di waktu malam mengatakan ibunya kebiasaan kerja kebiasaan sampai waktu sekitar jam.03.00. dan usman adalah sebagai tokang pembangunan, dengan usaha beliau untuk masyukseskan tempat solat dan masjid sehingga beliau sakit juga tetap hadhor dalam pendirian .

Biaya dalam pendirian masjid *Al-hidayahAl-islamiah* bangun masjid hanya dengan menggunakan biaya pungutan dari warga masyarakat yang hasil dari pekerja dikampung-kampung, kebiasaan kampung bendangdalam masyarakat pekerjaan tani dan sawah.

Pedoman wawancara

Nama : wan yusufwanduyee

Kedudukan ; dewan masjid

Topik ; pendirian sekolah TADIKA

1. Bagaimana kesepakatan dan pendirian tempat untuk pendidikan kanak-kanak masyarakat kampung *pendangdalam*?

Jawab : pengurus masjid *al-hidayahal-islamiah* sepakati untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kampung dengan membangunkan dengan mengunaka bambu dan daun dari pohon sagu, supaya bisa menahankan hujan dan menahan panas dengan menggunakan depan rumah tayohmaddeang masyarakat itu ekonomi kelas sederhana sehingga bangunkan ruang itu dengan bambu dan daun sagu itu sehingga 4 kali bangun.

Jadwal yang sepakati pada awalnya mulai mengajar setiap waktu sore setelah Kanak- pulang dari sekolah nasional Thailand. Berjalan hanya separoh jalan dengan masalah kekurangan waktu dalam memberi ilmu diwaktu sore, kebiasaan anak-anak kampung itu belajar sekolah nasional Thailand itu tidak sama sehing tidak jadi setabil dalam menjadwalkan dan guru juga kurang sempat diwaktu sore.

Musyawarah mencari solusi untuk memperlancarkan dalam memberikan ilmu kepada kanak-kanak. Maka pindah dari sore hari senin sampai jumat maka tukar jadi hari sabtu dan Minggu hingga sampai hari ini

Pedoman wawancara

Nama : Ahmad Abdurrohman

Kedudukan ; dewan masjid

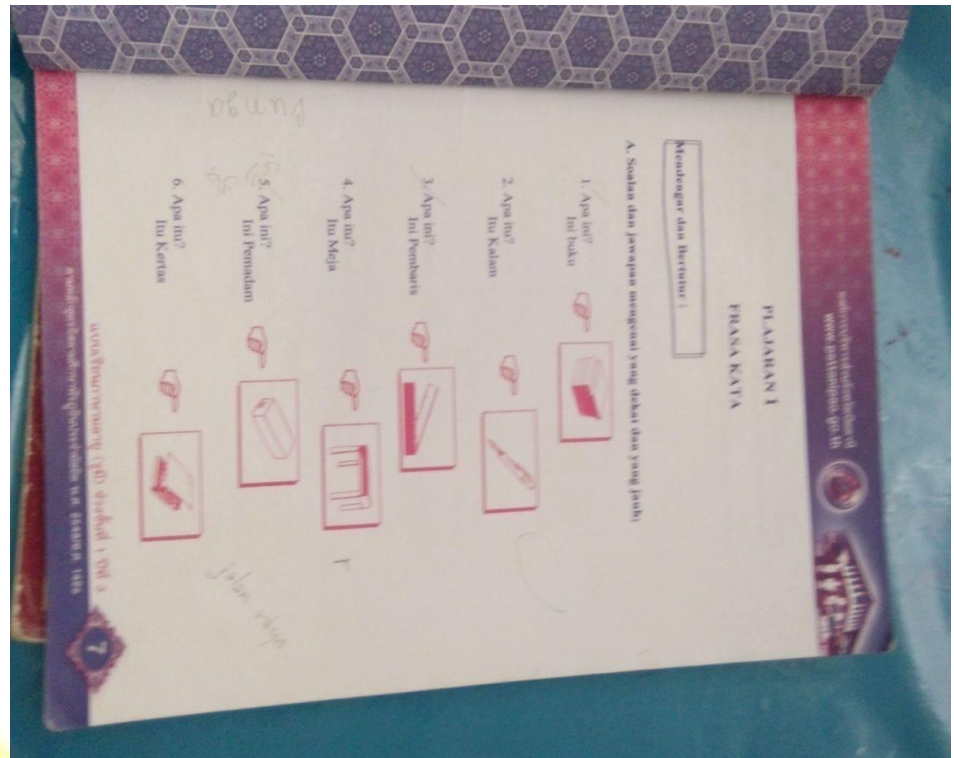
Topik ; Fasilitas kepada guru

1. Bagaimana kebijakan pengurus masjid untuk menambah semangat kepada seorang guru?

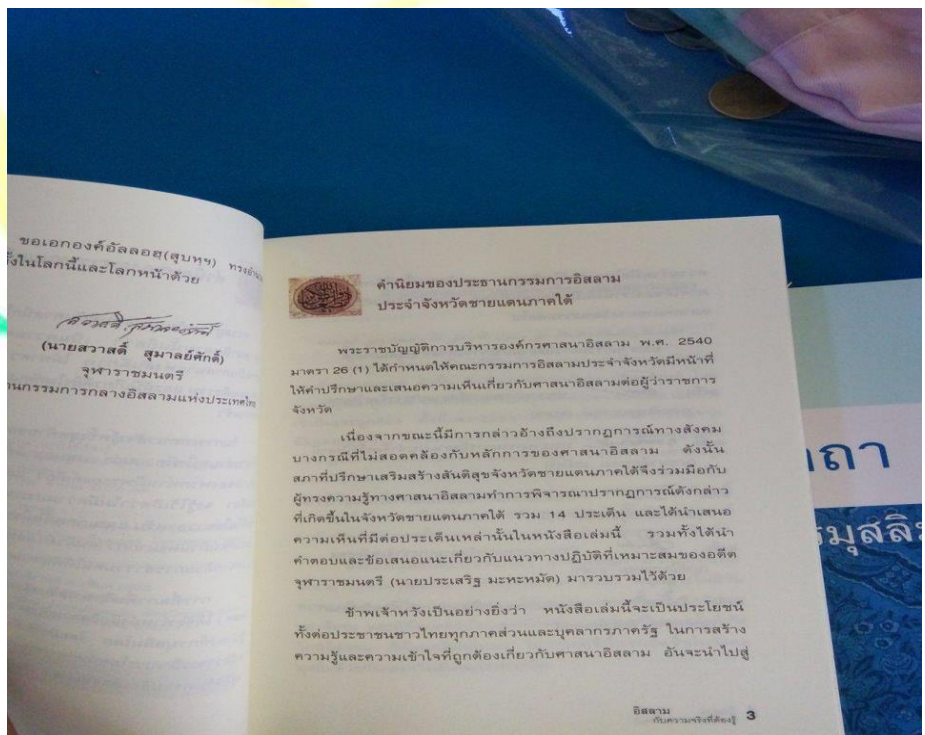
Jawab : keputusan musyawarah pengurus masjid dan keluarga masyarakat untuk memberikan fasilitas dengan memberi uang dan jamu makan. Yaitu hasil dari pungutan dari kanak-kanak setiap bulan dengan menggunakan kartu sebagai nilaian harga uang, dengan dua kartu, bagi warna biru dengan nilai harga 10 b. Atau 3000 rp. Dan kartu merah dengan nilai harga 20 b. Atau 6000 rp.

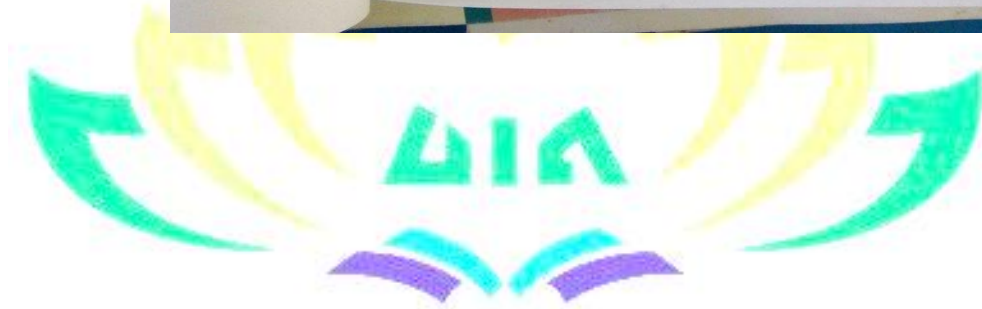
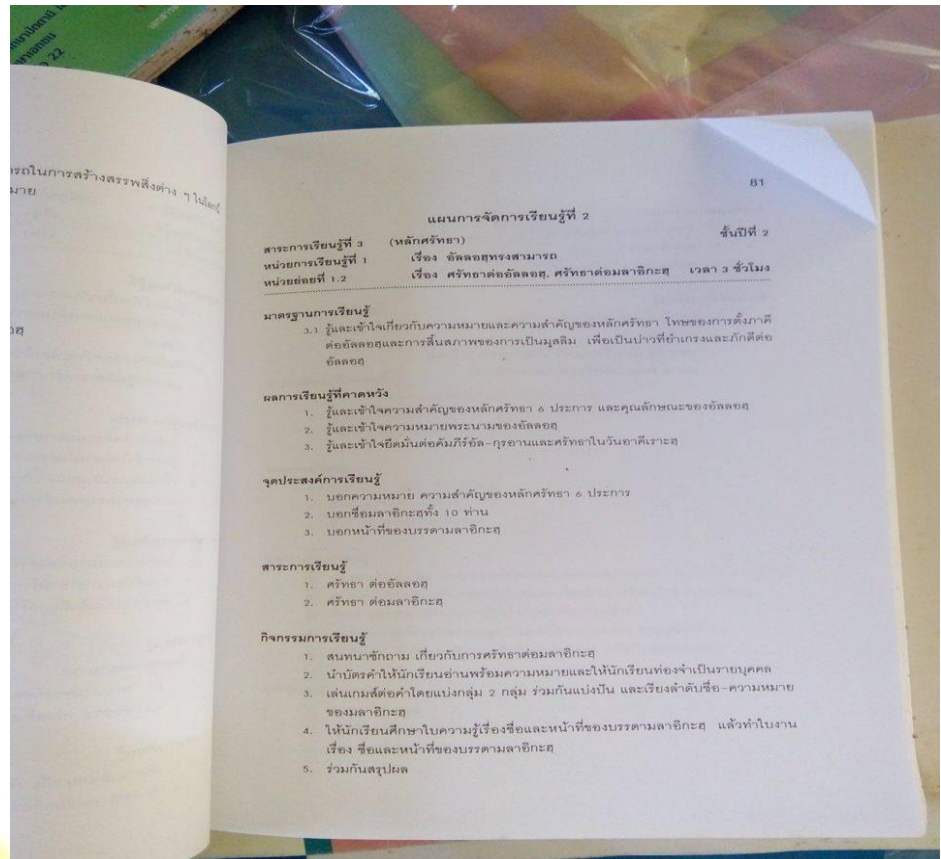
Kanak-kanak yang berada di kampung *Bendangdalam* mendapat karu biru dan kanak-kanak yang tinggal di luar kampung *Bendangdalam* pasti dapat kartu mirah karena dapat kartunya beda diantara dua itu keluarga masyarakat kampung harus memberi makan siang kepada guru. Masyarakat kampung pasti jamu makan kepada guru setiap keluarga diwaktu siang hari

Contoh buku dari pemerintah



KANDUNGAN		
PELAJARAN	ISI KANDUNGAN	MUKA
1	MAJLIS AGAMA ISLAM LT, BC, D	7
2	TAMAN KANAK-KANAK LP, BC, D	10
3	KAMPUNG BANDAR ML, BC, D	13
4	KEBUN BUAH-BUAHAN LD, ML, D	16
5	POKOK GETAH ML, BC, D	19
6	KASIHAN BELAS KEPADA LP, BC, D	22
7	BINATANG ML, BC, D	25
8	ORANG KAYA YANG BIJAK TW, BC, D	28
9	MERPATI ML, BC, D	31
10	ANJING DENGAN BAYANG-	34
11	BAYANG	38
12	KOPERASI	41
13	BELAJAR BAHASA-BAHASA	44
14	PEJABAT POS	48
15	YAYASAN KİYAY HAJI	51
16	SULONG	54
17	PANTUN TEKA TEKI	59
	DATUK PANJANG (1)	
	DATUK PANJANG (2)	





Gambaran masjid



Gambaean sokolah Melayu/Tadika



Acara kursus musimpanas





sejarah daeragmaqom ulama





Acara perlumbaan







Buku dari pustaka

